TESIS

TANTANGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

APPLICATION CHALLENGES OF ACCOUNTING STANDARDS ACCRUAL IN GOVERMENT IN THE AREA OF FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

STEFFIORNIS ANDINI LOPANG

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2016

Dipindai dengan CamScanner

T E S I S

TANTANGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

APPLICATION CHALLENGES OF ACCOUNTING STANDARDS ACCRUAL IN GOVERMENT IN THE AREA OF FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

STEFFIORNIS ANDINI LOPANG

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR

2016

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

TANTANGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

STEFFIORNIS ANDINI LOPANG

Nomor Pokok Mahasiswa: 2014.06.010

Telah dipertahankan dalam Seminar Hasil Penelitian
Pada tanggal 23 September 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Dr. Najmi Kamariah, SE.,M.Si	Nuraeni Sayuti, SE.,M.Si
Ketua	Anggota

Mengetahui

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin,MDA,Ph.D
NIP.19640706 199303 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala hormat, kemuliaan, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, karena pertolongan dan kasihNya kepada peneliti yang tiada berkesudahan selama masa perkuliahan bahkan dalam penyelesaian tesis yang berjudul "Tantangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan."

Keluarga menjadi tempat untuk berbagi segala bentuk perasaan yang dirasakan sehingga peneliti pun ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa terhadap Ayahanda Simon S. Lopang, SH.MH dan Ibunda Dian Ekasari serta saudara-saudariku terkasih Gabriella Virgina Lopang, S.ST, M.AP, Efrin Disma Lopang dan Josua Anugrah Dechristo Lopang atas dukungan dan semangatnya kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan program pascasarjana ini.

Pujian dan ucapan terima kasih pula tidak lupa peneliti berikan terhadap :

1. Prof. Amir Imbaruddin, M.DA,Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
2. DR. Najmi Kamariah, SE,M.Si dan Nuraeni Sayuti, SE,M.Si selaku pembimbing peneliti. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas waktu, bimbingan, dukungan dan arahannya.
3. DR. Muttaqin, M.BA dan DR. Wahidin, M.Si selaku tim penguji peneliti. Terima kasih atas koreksi dan sarannya terhadap penelitian peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan(ti) serta pegawai perpustakaan STIA LAN Makassar yang telah membantu penulis dalam membagikan ilmu,mengurus administrasi, pencarian buku dan referensi yang dibutuhkan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Agustinus Appang, SE beserta pejabat eselon dan staf yang telah mengizinkan dan membantu peneliti selama penelitian.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Lutfie Natsir, SH selaku pimpinan peneliti beserta pejabat eselon dan staf. Terima kasih untuk dukungannya.
7. Rekan-rekan mahasiswa magister angkatan tahun 2014 baik dari konsentrasi administrasi keuangan negara maupun konsentrasi yang lainnya. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
8. Teman-teman Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Makassar dan Jemaat Lanraki Biringkanaya. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya kepada peneliti.
9. Segenap pihak yang membantu namun tidak sempat disebutkan satu per satu.

Tesis ini merupakan salah satu hasil buah pemikiran manusia biasa sehingga tidak luput dari ketidaksempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif diharapkan mampu diberikan sebagai upaya dalam proses perbaikan karya yang sederhana ini.

Makassar, 2016

Penulis

Dipindai dengan CamScanner

INTISARI

STEFFIORNIS ANDINI LOPANG. 2014.06.010

TANTANGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Tesis, x hlm, 108 hlm

Penasehat : DR. Najmi Kamariah, SE,M.Si
Nuraeni Sayuti, SE,M.Si

Perubahan standar akuntansi pemerintahan mewajibkan SKPD memberlakukan basis akrual pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis penerapan akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis yang dilakukan ialah terkait komitmen pemimpin, sarana pendukung dan sumber daya manusia akan penerapan standar penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015 dengan adanya 7 laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas pada tahun 2015. Penerapan ini ditinjau dari aspek komitmen pemimpin ialah adanya kebijakan terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014. Dari aspek sarana pendukung yang tersedia yaitu adanya sistem aplikasi SIADINDA yang merupakan perangkat lunak dan adanya komputer serta print yang mendukung proses pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan dari aspek sumber daya manusia menunjukkan bahwa para pegawai khususnya di bidang Akuntansi BPKD memiliki pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang cukup terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu dengan adanya 5 orang pascasarjana, 2 orang profesi akuntansi, 13 orang sarjana, dan 1 orang sarjana muda.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul..... i

Halaman Pengesahan..... ii

Kata Pengantar..... iii

Intisari..... v

Daftar Isi..... vi

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar..... ix

Daftar Lampiran..... x

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang..... 1
B. Fokus Masalah..... 12
C. Tujuan Penelitian..... 12
D. Manfaat Penelitian..... 13

BAB II Tinjauan Teori

A. Tinjauan Teori
1. Konsep Administrasi Keuangan Negara..... 14
2. Konsep Keuangan Negara..... 18
3. Konsep Akuntansi Sektor Publik..... 26
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan..... 32
B. Definisi Konsep..... 51
C. Model Berpikir..... 51
D. Pertanyaan Penelitian..... 52

Dipindai dengan CamScanner

BAB III Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian..... 54
B. Unit Analisis..... 54
C. Teknik Pengumpulan Data..... 55
D. Instrumen Penelitian..... 56
E. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data..... 57

BAB IV Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 60
1. Visi dan Misi BPKD..... 61
2. Struktur Organisasi BPKD..... 62
3. Komposisi Pegawai BPKD..... 72
B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 72
1. Komitmen Pemimpin..... 88
2. Teknologi Informasi..... 93
3. Sumber Daya Manusia..... 99

BAB V Penutup

A. Simpulan..... 106
B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010..... 5

Tabel 2 Opini LKPD Tahun 2011 s.d Tahun 2014..... 10

Tabel 3 Lima Praktik Keteladanan dan Sepuluh Komitmen Kepemimpinan..... 44

Tabel 4 Sebaran PNS dan Non PNS pada Masing-Masing Bidang... 72

Tabel 5 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual..... 75

Tabel 6 Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran..... 79

Tabel 7 Ilustrasi Format Laporan Perubahan SAL..... 80

Tabel 8 Ilustrasi Format Neraca..... 82

Tabel 9 Ilustrasi Format Laporan Operasional..... 84

Tabel 10 Ilustrasi Format Laporan Arus Kas..... 86

Tabel 11 Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas..... 87

Tabel 12 Sebaran PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikannya di Bidang Akuntansi..... 101

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Siklus Akuntansi..... 27

Gambar 2 Model Berpikir..... 52

Gambar 3 Struktur Organisasi BPKD Prov. Sulsel..... 64

Gambar 4 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014..... 90

Gambar 5 Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014..... 91

Gambar 6 Aplikasi Sistem Aplikasi SKPD..... 95

Gambar 7 Rincian Menu Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD pada Aplikasi SIADINDA..... 96

Gambar 8 Arsip Laporan Keuangan SKPD Pemprov Sulsel..... 98

Gambar 9 Bimbingan Teknis Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah..... 103

Gambar 10 Penginputan Data Laporan Keuangan oleh Staf Bidang Akuntansi..... 104

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Pedoman Telaah Dokumen
3. Lampiran 3 Pedoman Observasi
4. Lampiran 4 Dokumentasi
5. Lampiran 5 Modul Kementerian Keuangan
6. Lampiran 6 LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
7. Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian
8. Lampiran 8 Riwayat Hidup Penulis

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik yang sedang berkembang di Indonesia, dimana akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan organisasi privat. Reformasi dalam bidang akuntansi telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia seiring dengan laju perkembangan akuntansi pemerintahan yang ada. Bentuk reformasi pun dimulai pada tahun 2003-2004 dengan menghasilkan 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga undang-undang yang ada mampu memberikan pokok-pokok perubahan di bidang keuangan negara seperti adanya kejelasan akan pengertian keuangan negara dan pelaku keuangan negara; batas pengelolaan dan tanggung jawab semakin jelas antara pemegang fungsi perbendaharaan dan pengguna anggaran; bentuk pertanggungjawaban keuangan negara menjadi lengkap; penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh suatu komite independen; kejelasan jangka waktu penyampaian pertanggungjawaban; adanya kewajiban menyusun dan

Dipindai dengan CamScanner

menyelenggarakan sistem pengendalian *intern*; penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dimulai tahun 2008 serta adanya pengaturan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan ideal dan membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang baik. Pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara ini mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada tata kelola keuangan negara dan daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara.

Penyelenggaran tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan harapan para penyelenggara pemerintahan. Namun seiring dengan bergulirnya waktu, perekonomian di Indonesia mengalami krisis yang disebabkan dengan adanya tata kelola yang buruk yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survey yang dilakukan *Transparency Internasional*. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance),* pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintah ini memiliki visi ialah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

Dipindai dengan CamScanner

negara yang akuntabel transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas. Untuk mencapai visi ini didukung dengan beberapa misi antara lain (1) mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum, (2) mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta (3) mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan. Tujuan dari komite ini ialah menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan praktik dan wacana akuntansi paling mutahir di Indonesia maupun di lingkungan internasional, membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan pertama kali diterapkan di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (selanjutnya ditulis PP No. 24 Tahun 2005), hal ini mengatur pengakuan, penilaian dan pengungkapan. SAP ini berbasis kas menuju akrual dimana untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan untuk asset, kewajiban, dan ekuitas berbasis akrual. Namun penerapan PP 24 Tahun 2005 ini masih bersifat sementara sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1), mengamanatkan penggunaan basis

Dipindai dengan CamScanner

akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambatnya 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas".

Untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) tersebut, KSAP telah menyusun SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP No. 71 Tahun 2010) menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan SAP berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Pada PP No. 71 Tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan SAP berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri). Sedangkan lampiran II merupakan SAP berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014, dengan kata lain lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada di PP 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia, yaitu perubahan SAP

Dipindai dengan CamScanner

berbasis kas menjadi SAP berbasis akrual. Perubahan yang bersifat *mandatory* ini wajib diterapkan di tahun 2015. Perubahan SAP tersebut selain telah diamanatkan oleh undang-undang keuangan negara, juga diharapkan agar memberikan informasi yang utuh tentang posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat pada PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki beberapa perubahan yang terurai dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010

Uraian	PP Nomor 24 Tahun 2005	PP Nomor 71 Tahun 2010
Basis Akuntansi	Basis Kas menuju Akrual	Basis Akrual
Komponen Laporan Keuangan	• Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan	• Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih • Neraca • Laporan Operasional • Laporan Arus Kas • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari tabel 1 di atas mengungkapkan bahwa ketika PP Nomor 24 tahun 2005 diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintahan ialah menggunakan basis kas. Basis kas untuk pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,

Dipindai dengan CamScanner

kewajiban dan ekuitas dana. Sedangkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan ialah sepenuhnya basis akrual untuk seluruh laporan keuangan pemerintahan. Dari tabel 1 diatas juga diketahui menyajikan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah. Komponen yang terdapat pada satu set laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 terdiri atas 4 laporan sedangkan untuk PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 7 laporan.

Penggunaan basis akrual menjadi tren di berbagai negara saat ini. Akuntansi berbasis akrual menjelaskan bahwa transaksi yang memengaruhi keuangan sebuah entitas dicatat pada saat terjadi bukan didasarkan pada saat menerima atau mengeluarkan uang, tetapi penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri praktik manajemen keuangan modern yang bertujuan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar memperhatikan kas. Akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik (BPKP, 2013:3).

Perubahan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual akan memberikan dampak terhadap proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik ini tentu saja akan mendapatkan tantangan dan hambatan dari kesiapan pemerintah pusat dan

Dipindai dengan CamScanner

daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini, yang paling utama adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) yaitu aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tujuan adanya SAP agar pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dapat diraih dengan adanya otonomi daerah dikarenakan hal ini merupakan upaya untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah secara lebih leluasa. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan mampu dipertanggungjawabkan.

Setiap daerah otonom kabupaten/kota maupun provinsi diperhadapkan pada peraturan yang mewajibkan untuk dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual di daerahnya. Pedoman yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Transparansi dan akuntabiltas publik pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor

Dipindai dengan CamScanner

publik di Indonesia. Komitmen akan pelaksanaan ini terus digencarkan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan juga ditandai partisipasi, efesiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini berdampak pula pada akuntansi sektor publik yaitu dengan mengadakan pembenahan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Pembenahan akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah tersebut sangat penting dilakukan dalam memenuhi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik.



Makassar (ANTARA News) - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2009 lepas dari penilaian "disclaimer".

Hasil pemeriksaan tahun lalu jauh lebih baik dari pemeriksaan APBN tahun sebelumnya, kata anggota enam BPK RI Rizal Djalil Selasa.

Ia mengatakan, APBD Sulsel tahun 2008 masuk kategori "disclaimer", tahun 2009 kualitasnya naik menjadi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan data yang di dapatkan dari *antarasulsel.com* yang diunggah pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 ditemukan fakta bahwa Pemprov Sulsel memperoleh *disclaimer* pada tahun 2008 dan WDP tahun 2009. Penyebab terjadinya *disclaimer* dikarenakan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP yang berlaku, kurangnya *adequate disclosure*, dan lemahnya sistem pengendalian internal serta kurang patuhnya terhadap peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyusunan dan pelaporan keuangan.

Hal ini yang memicu sehingga SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin memperbaharui pelaporan keuangan dan mempertahankan hasil yang telah didapatkan selama ini dengan menerapkan segala peraturan yang disepakati atau diputuskan di tingkat pusat dan menurunkannya dalam peraturan pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya. Adapun rincian opini LKPD Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 untuk masing-masing tingkat pemerintahan baik tingkat I yaitu pemerintah provinsi dan tingkat II yakni pemerintah kabupaten kota yang terdapat dalam lingkup Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2
Opini LKPD Tahun 2011 s/d 2014

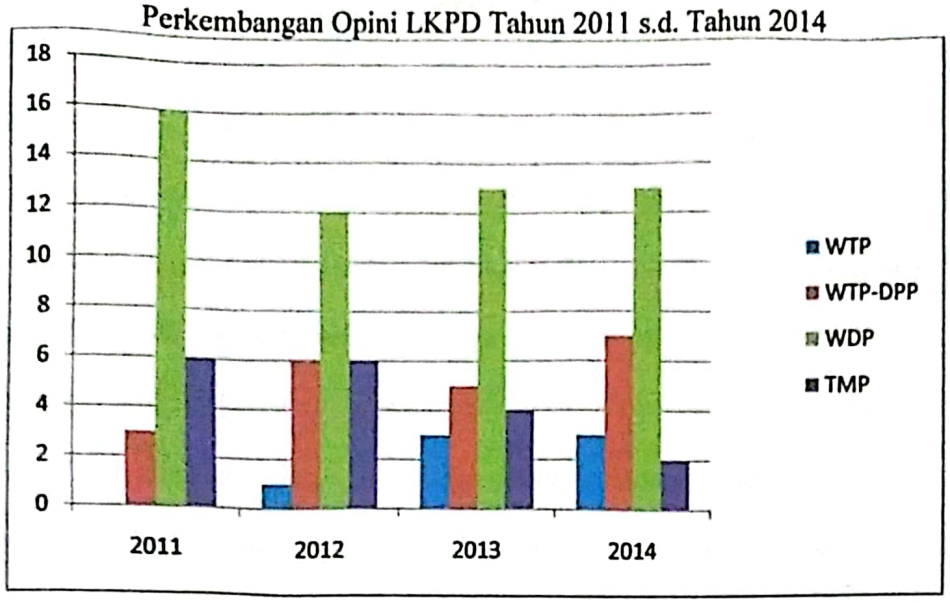
No	Nama Entitas	Opini LKPD TA			
		2011	2012	2013	2014
1	Prov. Sulsel	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
2	Kota Makassar	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Gowa	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Takalar	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	WDP
5	Kab. Jeneponto	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer
6	Kab. Bantaeng	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Kab. Bulukumba	WDP	WTP DPP	WTP	WTP DPP
8	Kab. Kep. Selayar	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer
9	Kab. Maros	WDP	WDP	WTP DPP	WTP
10	Kab. Pangkep	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
11	Kab. Barru	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
12	KotaPare-Pare	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP
13	Kab. Sidrap	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Kab. Enrekang	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kab. Tana Toraja	Disclaimer	WDP	WDP	WDP
16	Kab. Toraja Utara	WDP	WDP	WDP	WDP
17	Kab. Pinrang	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
18	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kab. Soppeng	WDP	Disclaimer	WDP	WTP DPP
20	Kab. Wajo	WDP	WTP DPP	WDP	WDP
21	Kab. Bone	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kota Palopo	Disclaimer	WDP	Disclaimer	WDP
23	Kab.Luwu	WDP	Disclaimer	WDP	WDP
24	Kab. Luwu Utara	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
25	Kab. Luwu Timur	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WTP DPP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Sul-Sel 2015.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa opini yang di dapatkan untuk pemerintah tingkat I dan II itu sangat beragam dari tahun ke tahun. Ada yang mendapat opini secara berturut-turut serta ada yang bergantian dari baik menjadi tidak baik dan sebaliknya. Persentase tingkat perubahan entitas dalam hal opini LKPD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada grafik 1 Perkembangan Opini LKPD tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Grafik 1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 s.d. Tahun 2014



Sumber: Hasil olah data sekunder BPK RI Perwakilan Sul-Sel, 2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa secara umum LKPD Tahun 2013 yang memperoleh peningkatan opini WTP adalah 3entitas (12 %), WTP-DPP adalah 5 entitas (20%) WDP adalah 13 entitas (52%) dan TMP adalah 4 entitas (16%) dari keseluruhan entitas pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara umum LKPD Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.jumlah LK yang memperoleh opini TMP (*disclaimer*) turun menjadi 2 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa dengan memperoleh opini WDP lebih banyak yaitu 13 entitas pemeriksaan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Sulsel merupakan salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengelola akan keuangan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah tidak menutup mata akan setiap perubahan aturan atau

Dipindai dengan CamScanner

kebijakan yang berlaku termasuk perubahan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan seluruh SKPD untuk memakai basis akrual pada tahun 2015. Komitmen pimpinan, sistem yang digunakan serta kesiapan sumber daya akan terjadinya perubahan standar akuntansi pemerintahan menjadi poin penting untuk ditinjau agar dapat melihat proses pengelolaan keuangan yang ada sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan efisien, efektif yang transparansi dan akuntabilitas dan memiliki keandalan informasi terhadap pengguna laporan keuangan yanga ada serta memberikan opini yang lebih baik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengangkat judul Penelitian: Tantangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Fokus Permasalahan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual diberlakukan dalam proses pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi untuk menambah dan memperluas serta mengembangkan pengetahuan dalam bidang administrasi keuangan negara dan daerah khususnya akuntansi pemerintahan lebih khusus dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengadakan perbaikan dalam meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah terutama dalam upaya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Administrasi Keuangan Negara

Dalam pengertian sempit, kata administrasi merupakan penyusunan atau pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali data tersebut secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha. (Siagian 2001:267)

Masih menurut Siagian (2001:267), administrasi dalam arti luas diartikan sebagai :

> "Keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula."

Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu :

a. Adanya dua orang atau lebih yang saling bekerjasama dalam hubungan yang sifatnya formal dan hirarkis,
b. Adanya tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dilaksanakan, serta
c. Ketersediaan sarana dan prasarana tertentu untuk menunjang berjalannya proses administrasi yang ada, (Siagian, 2001:268)

Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

Gordon (Syafiie, 1999:26) mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan proses, baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Secara sederhana, Gordon mengatakan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.

Demock (Syafiie, 1999:26), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Hal ini, menurut Demock, berarti administrasi publik sebagai segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat, baik pada ruang lingkup nasional maupun daerah.

Siagian (1996:8), memperkuat konsep administrasi yang telah dikemukakan oleh Gordon dan Demock terkait keterlibatan pemerintah dalam proses politik dan bentuk pelayanan, yang mengatakan bahwa administrasi publik ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan menurut The Liang Gie (1992:196) administrasi keuangan adalah proses pengurusan atau penyelengaaran penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dalam pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan dan pemeriksaan keuangan.

Pengertian administrasi keuangan pun dikemukakan oleh Memesah (1995:14) ialah sebagai serangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasilguna (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaan).

Administrasi keuangan menjelaskan suatu proses pengelolaan dan tata usaha keuangan yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya yang terkait dengan proses memperoleh, mewujudkan serta melaporkan keuangan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait. Komponen yang terdapat dalam administrasi keuangan setidaknya meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan.

Dengan adanya administrasi keuangan ini terkhususnya ketika setiap komponen-komponen yang ada terlaksana dengan baik maka akan memberikan pula beberapa manfaat diantaranya:

a. Teraturnya penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi,
b. Pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik,
c. Berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan, (The Liang Gie, 1992:198)

Dipindai dengan CamScanner

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang menyenangkan sekaligus menantang. Seperti manusia yang tidak dapat hidup sendiri, manajemen keuangan pun memiliki kaitan dengan bidang disiplin ilmu lainnya seperti akuntansi, ilmu ekonomi mikro dan makro, manajemen pemasaran, manajemen produksi, metode kuantitatif dan manajemen sumber daya manusia.

Sartono (2001:6) memberikan pengertian,

> "Manajemen keuangan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien."

Horne et.al (Fitriasari dkk, 2005:3) pun mendefinisikan manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya.

Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama: investasi, pendanaan dan manajemen aktiva. Pembahasan akan manajemen keuangan negara yang berkaitan dengan pendekatan manajerial mengandung pengertian bahwa terdapat fungsi-fungsi tertentu yang harus dilakukan atau terlaksana dalam mengelola keuangan negara, seperti perumusan kebijaksanaan negara di bidang keuangan, perencanaan anggaran negara, pelaksanaan berbagai kegiatan dengan menggunakan anggaran tertentu, perhitungan anggaran dalam arti penerimaan dan pengeluaran dan penggunaan anggaran serta laporan pelaksanaan anggaran.

Manajemen keuangan negara menuntut pertanggungjawaban yang tinggi terutama mengingat bahwa dana yang digunakan dalam pelaksanaan berbagai

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan pemerintah bersumber dari rakyat, misalnya dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak lainnya, yang pemanfaatannya pun harus demi kepentingan rakyat banyak. Berarti dari pengelola dan pengguna anggaran negara dituntut berperilaku positif seperti memiliki loyalitas, kejujuran, dan keterampilan yang tinggi sehingga tidak terjadi pemborosan, penyimpangan, penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.

Dalam manajemen keuangan negara terdapat fungsi pengawasan yang terkait dengan perencanaan anggaran dimana pengawasan ini bersifat administratif, politis dan sosial. Dalam sifat administratifnya, pengawasan melibatkan paling sedikit 2 pihak yaitu atasan langsung pelaksana kegiatan tertentu dan pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja dalam suatu organisasi tertentu. Dalam pengawasan yang sifatnya politis diselenggarakan oleh lembaga legislatif dan yang terakhir yaitu pengawasan yang sifatnya sosial dilakukan oleh masyarakat luas dengan berbagai cara termasuk penyampaian informasi baik secara langsung maupun melalui media.

Dalam manajemen keuangan pula, sistem pelaporan memiliki peranan yang penting dalam penggunaan anggaran yang ada. Dalam menjalankan fungsi ini sistem akuntansi yang digunakan sangat penting sehingga pelaporan keuangan memenuhi berbagai persyaratan, tidak hanya untuk kepentingan pertanggungjawaban administratif tetapi juga secara politis.

2. Konsep Keuangan Negara

Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajai aktivitas finansial pemerintah. sering juga disebut sebagai *publik sector*

Dipindai dengan CamScanner

economics/ publik economics. Keuangan publik membahas tentang fungsi mikroekonomi pemerintah, cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada dan distribusi pendapatan dimasyarakat melalui kebijakan dibidang pajak, pengeluaran, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berdampak pada penganguran dan tingkat harga.

Terkait pengertian keuangan publik, Sugandi (2011:98) mengemukan bahwa :

> "Keuangan publik sebagai suatu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Sedangkan sektor publik sendiri adalah seluruh unit pemerintah dan institusi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah termasuk BUMN dan BUMD."

Keuangan publik berfokus pada hal dalam mempelajari mengenai pendapatan dan belanja pemerintah, dan juga menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pemerintah pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Administrasi publik mempelajari mengenai keuangan publik dikarenakan pertumbuhan sektor publik dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar sehingga penting untuk dipelajari permasalahan maupun implikasi dari keuangan publik.

Dalam suatu organisasi aspek finansial, keuangan atau pendanaan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Hal ini memerlukan sistem administrasi yang baik. Administrasi keuangan merupakan gabungan dari kata administrasi dan keuangan yang memberikan pengertian bahwa pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dengan pencapaian tujuan sebuah organisasi

Dipindai dengan CamScanner

atau perusahaan yang pada akhirnya administrasi laporan keuangan berkaitan dengan laporan keuangan.

Sejak tahun 2003, perkembangan keuangan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pengetian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja (Yani, 2009:24). Setelah menggunakan aturan yang diadopsi dari Belanda yakni *Indische Comptabiliteitswt* (ICW), akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana dalam undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa:

> "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa keuangan negara memiliki sembilan aspek yang meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman,
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga,
c. Penerimaan negara,
d. Pengeluaran negara,
e. Penerimaan daerah,
f. Pengeluaran daerah,
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

Dipindai dengan CamScanner

lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah,
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dasar pengelolaan keuangan negara dilakukan pada asas-asas umum yang dikenal yang mencakup asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam pasal 58, menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern terkait pengelolaan keuangan negara. Sistem pengendalian intern tersebut mengatur:

1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh,
2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan dan pengawasan keuangan. Sedangkan sub bidang pengelolaan moneter meliputi fungsi-fungsi pengendalian dan koordinasi untuk menjaga stabilitas moneter, pengendalian

Dipindai dengan CamScanner

uang yang beredar, mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Sentral. Dan sub bidang yang terakhir ialah sub bidang pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, meliputi fungsi-fungsi pendataan, pengawasan, pencabutan dan penempatan kekayaan negara yang ditempatkan pada BUMN/BUMD maupun pada unit-unit pemerintahan lainnya.

Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dimana hal ini mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sebagai bagian integral dari keuangan negara dalam hal pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan meciptakan stabilitas sosial politik, keuangan daerah memiliki peranan penting. Peranan ini semakin penting dikarenakan adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah yang berupa subsidi dan bantuan, sehingga peranan keuangan daerah diupayakan mengalami peningkatan demi mendorong terwujudnya otonomi daerah yang bertanggungjawab nyata.

Ahli dan beberapa pedoman peraturan memberikan pengertian akan keuangan daerah, antara lain :

Dipindai dengan CamScanner

Tangkilisan (2005:76) mendefinisikan keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penyelenggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut."

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pun memberikan pengertian:

> "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut."

Dari pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hak daerah adalah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka segala kegiatan pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Negara pada dasarnya terdiri atas tiga kelompok, fiskal, kekayaan negara yang dipisahkan, dan moneter. Namun terkait dengan UU 23/1999 dan UU 3/2004, Bank Indonesia sebagai bank sentral ditetapkan menjadi lembaga negara independen, maka pengelolaan moneter diserahkan kepada bank sentral. Dengan demikian terkait dengan APBN sebagai wujud keuangan negara setiap tahunnya, pemerintah hanya mengelola fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk investasi (pada lembaga negara dan BUMN). Pada intinya fiskal adalah menyangkut penerimaan/pungutan dan

Dipindai dengan CamScanner

pengeluaran negara. Karena itu untuk urusan fiskal ini Menteri Keuangan Negara selaku Badan umum Negara, dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Dalam pengertiannya terkait pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dinyatakan oleh Ratmono dan Sholihin (2015:6) sebagai berikut :

> "Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah."

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah dapat diproses secara 4 tahapan Ratmono dan Sholihin, (2015:10), yaitu:

a. Perencanaan dan Penganggaran, yaitu penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD, penyusunan dan pengesahan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan SKPD, serta penyusunan dan pengesahan perda APBD.
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD terkait beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penyusunan DPA-SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan SPP, penerbitan SPM dan SP2D, pembelanjaan dana dan pertanggungjawaban dana.
c. Perubahan APBD, hal ini dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; eadaan darurat; dan keadaan luar biasa.
d. Akuntansi dan Pelaporan. Dalam tahap ini, proses pengelolaan keuangan daerah ini terdapatlah peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.

Kenneth J Davey dalam Djaneuri (2012:41) memperlihatkan hubungan keuangan negara dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat

Dipindai dengan CamScanner

dari kegiatan-kegiatan itu. Tujuan hubungan ini adalah untuk mencapai perimbangan antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah, sesuai satu sama lain di bawah supervisi pusat.

Hubungan negara dan daerah ini adalah salah satu aspek dari hubungan keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan fungsi di antara tingkatan pemerintahan sebagai perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara ini yaitu: asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Tujuan hubungan keuangan negara dan daerah secara umum adalah untuk memberikan kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah. Umumnya kemampuan fiskal daerah itu rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan yang harus ditanggung untuk menyelenggarakan pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Secara khusus pula hubungan keuangan negara dan daerah (Yani, 2009:12) memiliki tujuan yaitu:

a. Distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam pemungutan keuangan dan pengeluaran keuangan itu dapat menjamin penyerahan kewenangan pemerintahan atas sumber daya keuangan yang konsistensi dengan pelimpahan tanggung jawab dalam penyelenggaran urusan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, pembagian kewenangan bidang pemerintahan harus jelas batas-batasnya, kewenangan pemerintahan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
b. Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah tersebut menjanjikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber daya keuangan secara keseluruhan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi

Dipindai dengan CamScanner

pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

c. Sistem hubungan keuangan tersebut seharusnya atau sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah;
d. Pajak dan restribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat.

3. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. *American Accouting Association* dalam Yujana (1992:5) mendefinisikan:

> "Akuntansi sebagai suatu proses mengindentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut."

Pengertian ini menggambarkan bahwa akuntansi merupakan proses atau siklus yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Peranan akuntansi sangat bergantung pada fungsi yang dapat dilakukan oleh akuntansi. Fungsi akuntansi yang ada harus dapat dikembangkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. *Accounting Principles Board* (APB) dalam Sugiri (1998:3) memandang akuntansi dari fungsinya dengan memberikan definisi:

> "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis-dalam membuat pilihan-pilihan nalar yang di antara pelbagai alternatif arah tindakan."

Dipindai dengan CamScanner

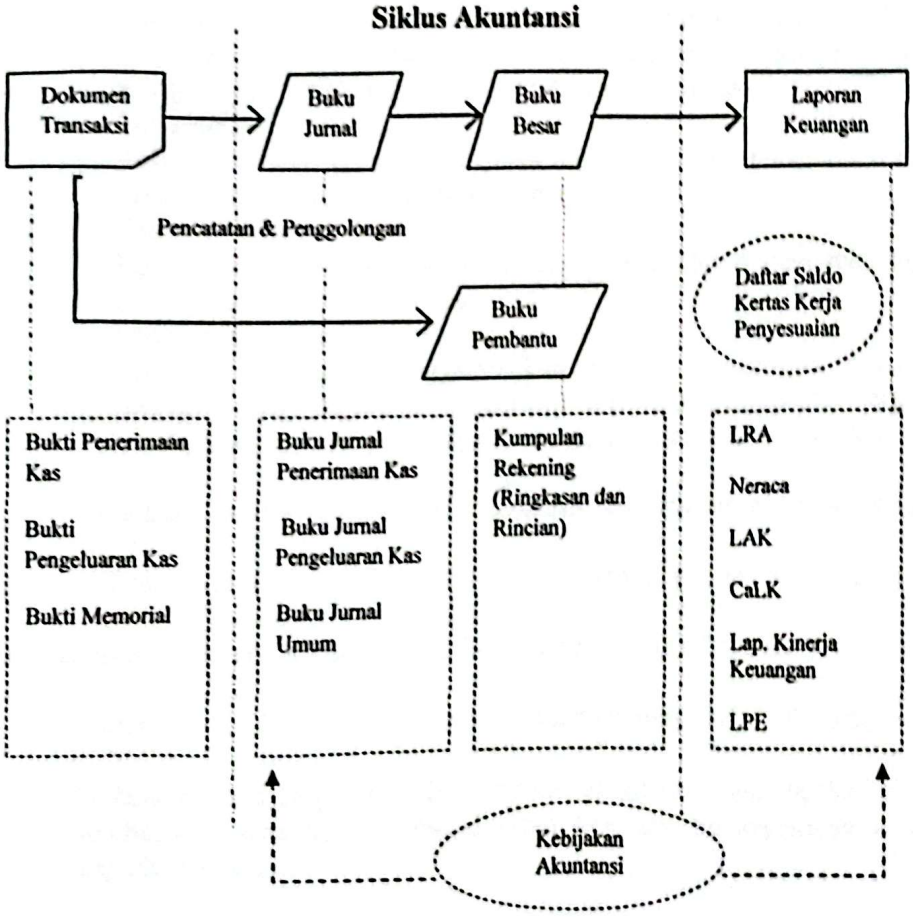
Menurut definisi di atas, akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi tersebut sebagai input dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan dikenal dengan istilah siklus akuntansi (Mahsun,dkk 2007 : 98). Bastian (2006 : 213) pun menyatakan:

> "Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yaitu penjurnalan akuntansi, pemindahbukuan ke dalam buku besar dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode".

Siklus akuntansi dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar 1
Siklus Akuntansi



Sumber: Bastian, 2006

Dipindai dengan CamScanner

Dari gambar di atas diketahui bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal setiap terjadi transaksi secara kronologis. Tembusan bukti-bukti pembukuan dibukukan ke dalam buku pembantu saat setiap terjadi transaksi. Setiap bulan atau periode tertentu, buku jurnal dijumlah dan dibukukan ke rekening-rekening dalam buku besar. Setiap akhir periode dari buku besar disusun laporan-laporan keuangan. Sistem akuntansi yang baik dapat memastikan berjalannya proses penyusunan laporan keuangan (Bastian, 2006:214), seperti:

a. Dokumen Transaksi
   Menurut jenisnya, transaksi terdiri dari transaksi kas dan transaksi non kas Bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi.
b. Buku Jurnal
   Bukti jurnal merupakan pendokumentasian bukti transaksi ke dalam alat/ media untuk melakukan pencatatan akuntansi. Bukti jurnal ini sebagai dasar melakukan pencatatan dalam buku jurnal.
c. Buku Besar
   Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau rekening yang dicatat dalam jurnal.
d. Buku Pembantu
   Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada dibuku besar.
e. Laporan Keuangan
   Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang kecil. Namun saat ini sektor publik mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.

Renyowijoyo (2008:2) memberikan pengertian mengenai ASP yakni:

> "Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik".

Dipindai dengan CamScanner

Pengertian di atas menyatakan bahwa organisasi sektor publik membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk menghadapi tekanan agar lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang harus memiliki manfaat bagi publik.

Perkembangan zaman menimbulkan pengelompokkan dalam bidang akuntansi dalam Soemarso (1999:9) antara lain:

a. Akuntansi keuangan; bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan.
b. Akuntansi pemeriksaan; bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.
c. Akuntansi manajemen; titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk manajemen perusahaan.
d. Akuntansi biaya; bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya.
e. Akuntansi perpajakan; laporan akuntansi yang digunakan untuk tujuan perpajakan berbeda dengan laporan untuk tujuan lain. Untuk tujuan pajak, konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan serta bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh undang-undang.
f. Akuntansi informasi, bidang ini menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif.
g. Penganggaran; bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan/organisasi untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengontrolannya.
h. Akuntansi pemerintahan; bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada atau terjadi di badan pemerintahan.

Dipindai dengan CamScanner

Akuntansi pada dasarnya merupakan suatu lingkup ilmu yang sangat luas, sehingga diperlukan pengelompokkan yang dapat memudahkan para pengguna dalam memahami penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan.

Renyowijoyo (2008:27) mengemukakan pula beberapa teknik akuntansi yang dapat diadopsi oleh sektor publik yaitu:

a. Akuntansi Anggaran
   Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah anggaran dengan jumlah realisasi. Teknik akuntansinya umumnya dilakukan dengan *single entry* namun sekarang ada tuntutan *double entry*.
b. Akuntansi Komitmen
   Akutansi komitmen merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi (pembelian) pada saat kontrak ditanda tangani atau order ditempatkan. Pendapatan dan/atau belanja diakui pada saat faktur dikeluarkan atau diterima. Umumnya menggunakan sistem akuntansi *double entry* dan atau *modified accrual basis*. Tujuan akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran.
c. Akuntansi Dana
   Pada organisasi sektor publik terdapat dua jenis dana tetapi yang digunakan pada organisasi pemerintahan ialah dana yang dapat dibelanjakan diperuntukkan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak untuk mencari laba.
d. Akuntansi Kas
   Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. GAAP tidak menganjurkan metode ini, namun untuk organisasi pemerintahan, masih digunakan dengan menggunakan metode *modified cash basis*.
e. Akuntansi Akrual
   Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik, serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas diperiode mendatang.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam siklus akuntansi terdapat bagian catatan. Karena hal inilah dibutuhkan beberapa teknik akuntansi untuk pencatatan dan penggolongannya. Teknik akuntansi disesuaikan dengan jenis organisasi dan peraturan yang terapkan pada saat kejadian transaksi berlangsung.

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan (Yadiati, 2007:22) adalah sebagai berikut:

a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
   1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
   2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
   3) Pengaruh proses politik;
   4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
   1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
   2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
   3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
   4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang terdiri dari :

a. Asumsi kemandirian entitas,
b. Asumsi kesinambungan entitas, dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang.

Dipindai dengan CamScanner

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan pertama kali dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen serta ditetapkan oleh Presiden SBY, yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun semenjak dikeluarkannya UU Nomor 17 tahun 2003 yaitu berarti berlaku tahun 2008. Jadi penerapan PP Nomor 24 tahun 2005 bersifat sementara tersebut hingga laporan keuangan pemerintah selesai diaudit tahun 2009, ternyata opini yang didapatkan oleh pemerintah saat itu masih menyedihkan.

Pada tanggal 22 Oktober tahun 2010 ditetapkannyalah PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual.Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, maka dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lambat 4 tahun setelah tahun anggaran 2010, sehingga disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. ADB *(Asian Development Bank)* secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul *Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries* dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi negara berkembang (Mulyana, 2009:13), yaitu:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual.
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting.
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal.
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai.
6. Badan *audit* tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat.
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model *big bang* dan model bertahap. Keuntungan pendekatan *big bang* adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.

Dipindai dengan CamScanner

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Penjelasan akan laporan keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010) adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   Laporan ini menyajikan informasi sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yag dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
   Informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.
c. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
   Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaran pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas (LAK)
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   Penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam laporan keuangan terdapat pendapatan yang berarti penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja ialah

Dipindai dengan CamScanner

semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer merupakan merupakan penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Serta pembiayaan yang dimana setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada neraca yang dimaksudkan dengan aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, serta ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan yang terdapat pada laporan operasional merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; Beban yang merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

Dipindai dengan CamScanner

kekayaan bersih; Transfer ialah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran 1 uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Hal-hal yang diungkapkan ataupun yang disajikan dalam CaLK ialah:

1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,
3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan bersama kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan,
6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,
7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Lebih lanjut dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki harus memenuhi empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Sehingga, laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Suatu laporan keuangan dinyatakan relevan ketika:

1) Memiliki manfaat umpan balik.
   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
2) Memiliki manfaat prediktif.
   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3) Tepat waktu
   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap
   Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Dipindai dengan CamScanner

b. Andal

Dalam menginformasikan atau melaporkan laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik berikut:

1) Penyajian Jujur
   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Dapat Diverifikasi
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3) Netralitas
   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

Dipindai dengan CamScanner

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memahami atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Selain mengubah basis SAP dan beberapa komponen pelaporan keuangan, PP ini mendelegasikan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (yang selanjutnya ditulis PSAP) dimana bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengeloalan keuangan negara. PSAP yang dilengkapi dengan Interprestasi PSAP dan/atau Buletin Teknis.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas
b. Manajemen
c. Transparansi
d. Keseimbangan Antargenerasi
e. Evaluasi Kinerja

Dipindai dengan CamScanner

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yakni :

a. Basis Akuntansi

Dalam Afiah (2009:22) terdapat jenis-jenis basis akuntansi yaitu:

1) Akuntansi berbasis kas, adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara Akuntansi berbasis akrual, adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi dan atau kejadian pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.
2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual, adalah basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3) membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas.

b. Nilai historis

Nilai historis atau nilai perolehan berdasarkan prinsip biaya merupakan dasar penilaian untuk pengakuan atas perolehan barang, jasa yang dinilai berdasarkan harga pertukaran yang terjadi pada saat terjadinya transaksi.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan

Dipindai dengan CamScanner

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Harapan (2007:78) mengartikan prinsip realisasi sebagai berikut:

> "Perubahan dalam aset atau kewajiban yang telah dianggap terjadi dan obyektif sebagai jaminan penyelesaian transaksi tertentu. Saat penyelesaian terletak pada kejadian transaksi pertukaran yang dilakukan di antara pihak-pihak yang independen atau dilakukan secara praktik dagang yang sudah diatur, atau berdasarkan surat perjanjian yang dianggap sudah pasti".

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Dipindai dengan CamScanner

g. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Skinner dalam Harahap (2007:85) ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar laporan keuangan disebut *full disclousure* antara lain:

1) Penjelasan tentang metode dan kebijakan akuntansi.
2) Informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi atau menunjukkan hak dari beberapa pihak yang memiliki klaim kepada perusahaan yang dilaporkan.
3) Perubahan kebijakan akuntansi dengan tahun sebelumnya atau metode penerapannya dan pengaruh perubahan tersebut.
4) Transaksi yang berasal dari pihak yang mempunyai hak mengontrol perusahaan atau dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang dilaporkannya.
5) Aktiva atau kewajiban yang masih bersifat contingency dan yang mengandung komitmen tertentu.
6) Transaksi keuangan atau transaksi yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca yang memberikan pengaruh material terhadap posisi keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan akhir tahun.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realiasasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain komponen-komponen yang telah disajikan, organisasi juga perlu memperhatikan kewajaran penyajian laporan keuangan. Penyajian wajar menurut Jurnal Akuntansi Keuangan ialah:

1) Penyajian akun pada laporan posisi keuangan
2) Hubungan istimewa
3) Penyajian akun pada laporan laba rugi

Dipindai dengan CamScanner

4) Identitas organisasi
5) Penyajian arus kas
6) Catatan atas Laporan Keuangan
7) Perubahan kebijakan akuntansi
8) Penyajian kembali

Simanjuntak dalam Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Keuangan (2014) menyatakan beberapa tantangan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen Pemimpin

Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat baik bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat maupun Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Komitmen melalui pendapat Ratminto dan Winarsih (2007:125), dinyatakan sebagai keteguhan hati, tekad yang mantap untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini.

Sedangkan Kouzes dan Posner dalam Pasolong (2010:15) memberikan 5 praktik untuk menjadi pemimpin teladan dan 10 komitmen kepemimpinan yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3
Lima Praktik Keteladanan dan Sepuluh Komitmen Kepemimpinan

No.	5 Praktik Keteladanan	10 Komitmen Kepemimpinan
1	Menantang Proses	1. Mencari kesempatan menantang untuk mengubah, mengembangkan, menginovasi, dan meningkatkan. 2. Melakukan eksperimen, mengambil resiko, dan belajar dari kesalahan yang menyertainya.
2	Mengilhami Wawasan Baru	3. Membayangkan masa depan, meningkatkan semangat menuju kejayaan. 4. Mengajak orang lain dalam wawasan, bersama dengan mengimbau melalui nilai-nilai, perhatian, harapan, dan impian bersama bawahan.
3	Memungkinkan Orang Lain dapat Bertindak	1. Menganjurkan untuk mencapai tujuan secara penuh melalui kerja sama serta mebina kepercayaan. 2. Memperkuat orang-orang dengan cara memberikan kekuasaan, menyediakan pilihan, mengembangkan keterampilan, memberikan tugas penting, dan menawarkan dukungan yang riil. 3. Memberikan teladan dengan cara berperilaku konsisten yang sesuai wawasan bersama.
4	Menjadi Petunjuk Jalan	4. Mencapai kemenangan kecil yang meningkatkan kemajuan secara konsisten dan membina komitmen. 5. Menghargai konstribusi individu kepada keberhasilan setiap tugas.
5	Mendorong Hati	6. Merayakan keberhasilan tim secara teratur

Sumber: Pasolong, 2010.

Berdasarkan tabel 3 di atas, di dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap eksekutif swasta dan pemimpin birokrasi. Hal ini menunjukkan harapan yang diinginkan pengikut kepada pemimpinnya dengan melihat keteladanan yang diberikan serta komitmen yang di ambil dalam memimpin suatu organisasi.

Dipindai dengan CamScanner

Komitmen dan dedikasi pemimpin dan orang yang dipimpin yang dibangun di atas budaya kualitas hanya akan berguna apabila terfokus kepada kepentingan organisasi. Yang dimaksudkan dengan fokus kepada kepentingan organisasi di sini ialah tekad dan upaya bersama yang tertuju kepada penguatan organisasi. Penguatan organisasi adalah begitu penting, karena dengan menguatkan organisasi, organisasi akan berkembangkan dan membawa dampak positif kepada semua peserta yang terlibat di dalamnya. Komitmen ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinan organisasi. Terkait akan pimpinan itu sendiri, Waluyo (2007:173) mengatakan bahwa pimpinan merupakan unsur yang paling utama dalam organisasi, karena baik buruknya perilaku bawahan tergantung pada perilaku pimpinan dalam membina bawahannya.

Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan dalam suatu suatu birokrasi bila ingin sukses. Terlebih lagi pegawai-pegawai yang baik, selalu ingin bagaimana mereka dapat memberikan konstribusi dalam pencapaian tujuan birokrasi. Untuk membangkitkan semangat kinerja para pegawai diperlukan kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan birokrasi.

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

2. Sarana Pendukung

Sarana pendukung merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam berbagai aktivitas perusahaan yang berbentuk fisik serta dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Sarana pendukung ini mempunyai manfaat di masa depan dan umur atau masa manfaat relatif permanen. Salah satu sarana pendukung ialah teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.

Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian internal yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual;

Menurut Jurnali dan Supomo (2002:36) pemanfaatan teknologi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, pemanfaatan tingkat integrasi TI pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari :

Dipindai dengan CamScanner

1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Suatu sistem informasi akuntansi dianggap efektif, jika bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan pengembangan sistem itu sendiri. Menurut Jogiyanto (2003:14), informasi yang berkualitas dari suatu sistem informasi tergantung pada tiga hal, yaitu:

1. Akurat
   Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
2. Tepat waktu
   Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan didalam pengambilan keputusan. Bila keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.
3. Relevan
   Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda.

Hal yang disampaikan oleh Jogiyanto ini senada dengan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD-SKPD yaitu: relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan

Dipindai dengan CamScanner

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal utama yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

a. Materialitas,
b. Pertimbangan biaya dan manfaat,
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif

Dipindai dengan CamScanner

antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

3. Sumber Daya Manusia

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan SDM yang memiliki kompentensi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.

Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai (Matindas, 2002:89).

Dipindai dengan CamScanner

Sumber daya manusia yang kompeten menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) diungkapkan dalam tiga aspek, yaitu:

1. Pengetahuan, ialah informasi yang dimiliki oleh seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya,
2. Kemampuan, ialah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal,
3. Perilaku atau sikap, ialah pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit.

Selain dari 3 tantangan di atas, disebutkan pula tantangan dalam penerapan standar akuntansi pemerimtahan ialah terkait resitensi terhadap perubahan dan lingkungan/masyarakat. Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pada umumnya terdapat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan tidak mau untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh

Dipindai dengan CamScanner

dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

B. Definisi Konsep

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengungkapkan mengenai perubahan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun konsep peneliti pada penelitian ini adalah terkait:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah adanya perubahan penggunaan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.
2. Komitmen pemimpin dimana peneliti akan melihat dari dukungan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mewujudkan penerapan SAP berbasis akrual ini.
3. Sarana pendukung yang akan ditinjau teknologi informasi yang digunakan dalam melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Sumber daya manusia yang kompeten yang akan diamati dan diteliti dari segi pengetahuan, kemampuan serta perilaku sumber daya yang ada dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual.

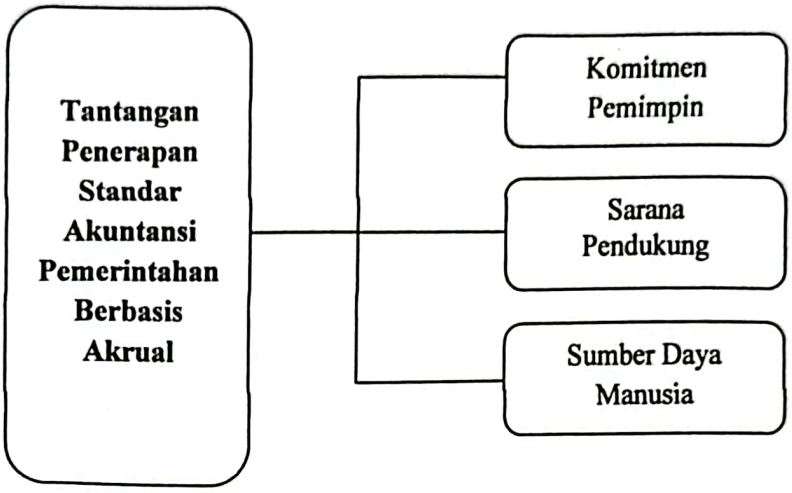
C. Model Berpikir

Untuk memperjelas definisi konsep yang telah diutarakan oleh peneliti, maka dibuatlah suatu model berpikir yang merupakan penjelasan secara

Dipindai dengan CamScanner

deskriptif-naratif yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep kunci yang secara integral merupakan potret dari fokus permasalahan. Model berpikir tersebut ialah:

Gambar 2
Model Berpikir



Sumber: Modul Kementerian Keuangan (2014)

D. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai atau mendapatkan hasil penelitian terkait akan penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari aspek komitmen pemimpin ?
2. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari aspek sarana pendukung ?

Dipindai dengan CamScanner

3. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari aspek sumber daya manusia ?

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripsi analisis, yaitu strategi penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, yang bermaksud untuk menyajikan suatu gambar terperinci tentang segala situasi dan gejala yang terjadi. Pada penelitian ini dipilih penelitian kualitatif dengan alasan bahwa permasalahan yang dikaji memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Selain itu pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola lain yang dihadapi dan situasi yang dapat berubah selama penelitian berlangsung.

B. Unit Analisis

Unit analisis yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan data penelitian ditetapkan informan penelitian yaitu orang-orang yang memahami fokus penelitian, antara lain:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Sulsel (1 orang),
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel (1 orang),

Dipindai dengan CamScanner

3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel (1 orang),
4. Staf Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel (3 orang)

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperoleh data mengenai apa yang diteliti, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah :

1. Wawancara

Dengan melakukan wawancara, peneliti akan mampu untuk menangkap bahasa isyarat yang diberikan oleh responden, tidak hanya sekedar yang dijawabkan atas pertanyaan, namun juga keakuratan dari jawaban tersebut. Dipandang dari cara melakukannya, wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dan wawancara dengan menggunakan telepon. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan responden. Dipandang dari struktur pertanyaan yang diajukan, wawancara dapat dibagi menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dipindai dengan CamScanner

2. Telaah Dokumen

Dokumen yang diambil dalam pengumpulan data ini adalah berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Telaah dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif ini. Teknik ini juga merupakan suatu proses untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dengan lebih fokus pada pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang ditanyakan. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan untuk memperoleh data dari informan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi didalam kehidupan informan selama proses penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instumen penelitiannya adalah peneliti sendiri sehingga diperlukan wawasan yang luas tentang substansi masalah atau pokok masalah yang akan dibahas dan penguasaan teknik-teknik pengumpulan data sehingga ketika melakukan penelitian di lokus, seluruh pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan pada informan dapat dikuasai dengan baik sehingga dalam prakteknya dapat memudahkan melakukan instrumen

Dipindai dengan CamScanner

pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Instumen yang digunakan adalah pedoman yang merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan wawancara, sehingga topik pembicaraan tetap dalam pokok permasalahan yang diteliti. Selain mempermudah bagi peneliti dalam pelaksanaannya, juga supaya efisiensi waktu pelaksanaan dapat lebih diminimalisir.

2. Pedoman Telaah Dokumen

Dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis serta pengambilan gambar yang relevan dengan obyek atau permasalan penelitian.

3. Pedoman Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah pedoman observasi yang berupa pengamatan dan keterlibatan secara langsung terkait hal-hal yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini.

E. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Prosedur pengolahan data adalah tahapan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis, yang tahapannya meliputi :

1. Klasifikasi materi data yang terdiri dari:
   a) Rekaman wawancara
   b) Telaah dokumen

Dipindai dengan CamScanner

c) Data primer dan data sekunder

2. Mengklasifikasi data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti.
3. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen, satuan gejala dalam konteks analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Suatu penelitian memerlukan suatu analisis data yang dapat digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Proses yang dilakukan adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang ingin mengetahui penelitian ini.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap atau alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi, dimana :

1. Tahap Reduksi Data.

   Data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Dipindai dengan CamScanner

2. Tahap Penyajian Data.

   Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Peneliti akan menyajikan dan menampilkan dari data yang terkumpulkan dan dianalis sebelumnya..

3. Tahap Penarik Kesimpulan/Verifikasi.

   Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Data yang telah direduksi akan disajikan pada tahap penyajian data selanjutnya akan diverifikasi dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dalam penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanahkan pada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan produk dari peraturan daerah tersebut, yang sebelumnya bernama Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Oleh karena itu, mandat yang dulunya diemban oleh Biro Keuangan diintegrasikan ke dalam mandat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya bermuara pada lahirnya Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 85 huruf (a) dan pasal 85 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
   b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
   c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota ;

   Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Menjadi Pengelola Keuangan Daerah Yang Terpercaya Dan Membanggakan Masyarakat Sulawesi Selatan, Serta Menjadi Instrumen Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018.

b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar Visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasional organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Dalam Lingkup BPKD Prov. SulSel
2. Meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang Berlaku
3. Mendorong Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tertib Administrasi sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang Berlaku
4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi dalam

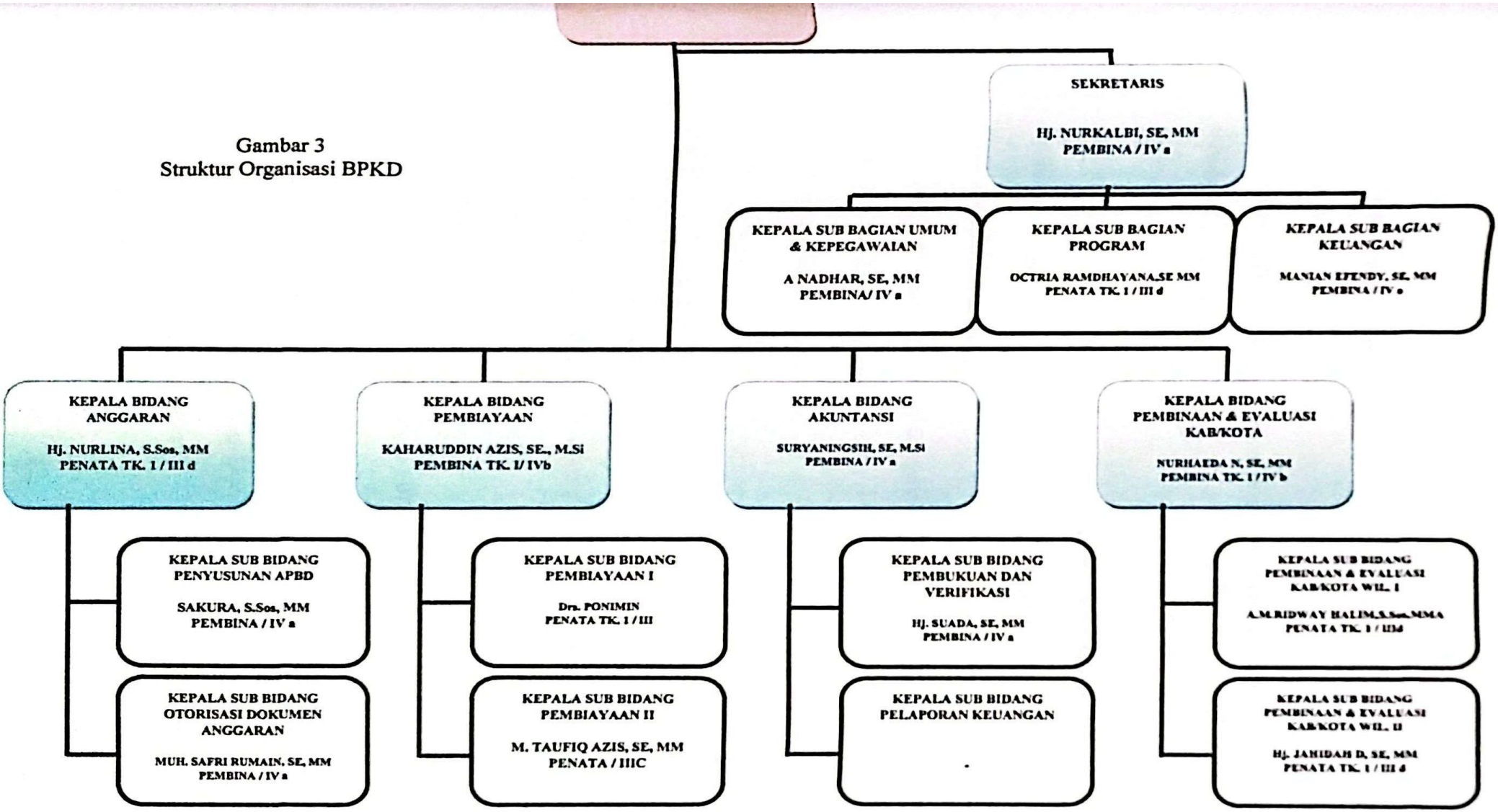
Dipindai dengan CamScanner

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun struktur organisasi Badan PKD Berdasarkan Pasal 85 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3
Struktur Organisasi BPKD



Sumber: Profil BPKD Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan

   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membawahi 1 sekretaris dan 4 bidang.

2. Sekretariat

   Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Badan dan didukung oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian terdiri dari :

   a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

   b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;

   c. Kepala Sub Bagian Program;

3. Bidang - Bidang

   Bidang – Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 4 Bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

   a. Kepala Bidang Anggaran ;

      1) Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD

      2) Kepala Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran

   b. Kepala Bidang Pembiayaan

      1) Kepala Sub Bidang Pembiayaan I.

      2) Kepala Sub Bidang Pembiayaan II

   c. Kepala Bidang Akuntansi

Dipindai dengan CamScanner

1) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

2) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan

d. Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Wilayah I.

2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka para pegawai yang terdapat pada struktur organisasi Badan Pengeloloaan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi anggaran, pembiayaan, akuntanis, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pembiayaan, akuntanis, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;

d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : (a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (b). Sub Bagian Keuangan, (c). Sub Bagian Program. Secara umum tugas pokok Sekretariat adalah mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. Pengorganisasian program dan kegiatan serta pengolahan data keuangan dan penyajian data;

d. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

e. Pembinaan administrasi penyusunan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan jangka menengah dan tahunan;

f. Pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang-Bidang

a. Bidang Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

Kepala Bidang Anggaran memiliki tugas utama melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalamperumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi standarisasi teknis penganggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang penganggaran;
2) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah dibidang penyusunan APBD dan Otorisasi dokumen anggaran.
4) Pengkoordinasian dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penganggaran.
5) Pengkoordinasian dan penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah.
6) Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah provinsi.
7) Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD serta perubahannya.
8) Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA – SKPD.

Dipindai dengan CamScanner

9) Mengkoordinasikan penyusunan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar Kabupaten/Kota.

10) Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (concurrent) antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

11) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Bidang Pembiayaan

Kepala Bidang Pembiayaan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalammerumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari bidang ini adalah :

1) Penyusunan kebijakan kegiatan perbendaharaan bidang pembiayaan;

2) Pelaksanaan penatausahaan kegiatan perbendaharaan bidang pembiayaan;

3) Pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan kegiatan perbendaharaan bidang pembiayaan;

Dipindai dengan CamScanner

4) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengoreksian serta menandatangani surat perintah pencairan dana lingkup SKPD Prov. Sulsel;

5) Melaksanakan penatausahaan administrasi belanja bunga, subsidi, hutang dan pengeluaran pembiayaan serta belanja tidak terduga;

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencairan SP2D;

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalamperumusan kebijakan dan pelaksanaan standarisasi teknis di bidang Akuntansi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1) Perumusan Kebijakan di bidang akuntansi dan verifikasi;

2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang akuntansi dan verifikasi;

3) Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi di bidang akuntansi pada Provinsi Sulawesi Selatan;

4) Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban SKPD pada Provinsi Sulawesi Selatan;

5) Pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi pada SKPD Provinsi Sulawesi Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

6) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

7) Melaksanakan fasilitasi tugas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kab/Kota.

Bidang ini memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalamperumusan kebijakan dan pelaksanaan standarisasi teknis di bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi APBD Kab/Kota;

c. Pelaksanaan monitoring hasil evaluasi dan pelaporan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pelaksanaan monitoring dan koordinasi tindak lanjutnya ;

d. Melaksanakan penatausahaan administrasi belanja bagi hasil daerah, pendidikan dan kesehatan gratis dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan keuangan Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Kesehatan Gratis;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Komposisi Pegawai BPKD

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu sumber utama penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis operasional berjumlah 122 orang yang terdiri dari 93 orang PNS dan 29 orang Non PNS.

Tabel 4
Sebaran PNS dan Non PNS pada Masing-Masing Bidang

Sebaran PNS dan Non PNS pada Masing-Masing Bidang	
Nama Bidang	**Jumlah**
Bagian Sekretariat	30
Bidang Anggaran	14
Bidang Pembiayaan	30
Bidang Akuntansi	29
Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota	19
JUMLAH	**122**

Sumber: Profil BPKD Prov. Sulsel Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4, maka dapat dilihat bahwa sebaran jumlah pegawai pada masing-masing bidang berbeda-beda. Bidang yang memiliki jumlah pegawai terbanyak terdapat pada bagian sekretariat dan pembiayaan yaitu masing-masing 30 orang dan yang paling sedikit terdapat pada bidang anggaran. Namun hal ini bukan menjadi penghalang atas kinerja pada tiap-tiap bidang dikarenakan untuk setiap tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN),

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas.

Beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

Berbagai organisasi di Indonesia termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari pernyataan-

Dipindai dengan CamScanner

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan *audit* di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden No.84 Tahun 2004, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 57 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa diperlukan suatu Komite Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Undang- Undang. No 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 mengenai KSAP telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden No.3 Tahun 2009 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara

Dipindai dengan CamScanner

berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP dalam tugasnya telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis *cash towards accrual*, dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dan terakhir dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP berbasis akrual penuh *(full accrual)*.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada tanggal 22 Oktober, KSAP menetapkan langkah-langkah strategi dalam upaya penerapan SAP Berbasis Akrual ini. Langkah Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual ini adalah:

Tabel 5
Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

TAHUN	STRATEGI
2010	• Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual • Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual • Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	• Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan *detail requirement*) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	• Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	• Piloting beberapa KL dan BUN • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	• *Parallel run* dan konsolidasi seluruh LK • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	• Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel 5 di atas, didapatkan informasi yang terkait dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk terwujudnya penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada setiap SKPD-SKPD yang ada di Indonesia. Dari tahapan yang ada terlihat poin mengenai aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, pengembangan sistem akuntansi dan TI, serta pengembangan sumber daya manusia. Serta terimplementasi secara penuhnya basis akrual pada tahun 2015.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Hal Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang

Dipindai dengan CamScanner

dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan *audit*.

Angka-angka akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif bagi pimpinan sektor publik dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki, peningkatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Situasi seperti ini mendorong aspek relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas kinerja keuangan suatu agen sektor publik menjadi perhatian para pimpinan organisasi pemerintah

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, telah dilakukan wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel dan 3 orang Staf Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel. Selain itu, dilakukan juga studi dokumentasi dan observasi.

Dipindai dengan CamScanner

Perbedaan utama antara penerapan basis kas dan basis akrual adalah pada pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sementara basis kas didasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Selain pada pengakuan pendapatan dan biaya, perbedaan utama ialah komponen laporan keuangan pokok yang dibuat dan disajikan berdasarkan basis tersebut. Pada basis akrual laporan keuangan pokok yang harus disajikan dan telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015, ialah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Salah satu komponen keuangan ialah laporan realisasi anggaran. Dimana laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya suatu periode tertentu. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait laporan realisasi anggaran ialah seperti tabel dibawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 6
Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN PERPAJAKAN**				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12					
13	**PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	AAA	AAA	AA	AAA
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18					
19	**PENDAPATAN HIBAH**				
20	Pendapatan Hibah	AAA	AAA	AA	AAA
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	**JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)**	xxx	xxx	xx	xxx
23					
24	**BELANJA**				
25	**BELANJA OPERASI**				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	**Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)**	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	**BELANJA MODAL**				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	**Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)**	xxx	xxx	xx	xxx
43	**JUMLAH BELANJA (33 + 42)**	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	**TRANSFER**				
46	**DANA PERIMBANGAN**				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	**TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)**				
54	Dana Otonom Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	**JUMLAH TRANSFER (51 + 56)**	xxx	xxx	xx	xxx
58	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)**	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	**SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)**	xxx	xxx	xx	xxx

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Berdasarkan tabel 6 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada lampiran dan mengungkapkan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi

Dipindai dengan CamScanner

Selatan ada sedikit perbedaan rincian yaitu pendapatan dianggarkan Rp 6.445.779.161.296,00 tetapi realisasinya 94,72% yaitu sebesar Rp 6.105.815.095.557,51 yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah belanja dan transfer untuk tahun 2015 yaitu 6.149.604.542.113,18, sehingga terdapat surplus/defisit sebesar (Rp 43.789.446.555,67). Pembiayaan netto sebesar Rp 173.744.920.343,82 diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp 309.734.307.064,82 dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 136.000.000.000,00 dan menghasilkan SILPA Rp 129.955.473.788,15

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait laporan perubahan SAL ialah dibawah ini:

Tabel 7
Ilustrasi Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX
7	Lain-lain	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel 7 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada lampiran dan mengungkapkan saldo anggaran lebih awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ialah Rp 191.455.881.437,82 dan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebanyak Rp 191.455.881.437,82. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) sebanyak Rp 11.666.434.882,15 dan pos lain-lain sebesar Rp 118.289.038.906,00 sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2015 ialah sebanyak Rp 129.955.473.788,15

3. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait neraca pada tabel 8 ialah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 8
Ilustrasi Format Neraca

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**ASET**		
2			
3	**ASET LANCAR**		
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)**	**xxx**	**xxx**
21			
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	**Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)**	**xxx**	**xxx**
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	**Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)**	**xxx**	**xxx**
34	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)**	**xxx**	**xxx**
35			
36	**ASET TETAP**		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	**Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)**	**xxx**	**xxx**
45			
46	**ASET LAINNYA**		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	**Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)**	**xxx**	**xxx**
53			
54	**JUMLAH ASET (20+34+46+52)**	**xxxx**	**xxxx**
55			
56	**KEWAJIBAN**		
57			
58	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)**	**xxx**	**xxx**
66			
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)**	**xxx**	**xxx**
74	**JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)**	**xxx**	**xxx**
75			
76	**EKUITAS**		
77	**EKUITAS**	**xxx**	**xxx**
78	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)**	**xxxx**	**xxxx**

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel 8 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula neraca yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada lampiran dan mengungkapkan jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rp 8.146.167.988.934,76, jumlah kewajiban sebesar Rp 795.500.319.402,60 dan jumlah ekuitas ialah sebanyak Rp 7.350.667.669.532,16

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait laporan operasional pada tabel 9 ialah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 9
Ilustrasi Format Laporan Operasional

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Meterai	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	BEBAN				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
40					
41	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	SURPLUS /DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Berdasarkan tabel 9 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula laporan operasional yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada

Dipindai dengan CamScanner

lampiran dan mengungkapkan jumlah pendapatan laporan operasional Rp 6.030.107.565.007,29 dan jumlah beban Rp 6.067.714.898.691,41.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait laporan arus kas pada tabel 10 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula laporan arus kas yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada lampiran dan mengungkapkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 826.766.579.660,29 , jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (840.961.558.806,00), jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp (16.085.661.812,00) dan saldo akhir kas sebesar Rp 130.096.680.361,15. Ilustrasi format untuk laporan arus kas pada tabel 10 ialah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	**Arus Keluar Kas**		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	XXX	XXX
34	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
35	**Arus Masuk Kas**		
36	Penjualan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 56)	XXX	XXX
58	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
59	**Arus Masuk Kas**		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	**Arus Keluar Kas**		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
83	**Arus Masuk Kas**		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	**Arus Keluar Kas**		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Format yang disajikan pada Modul Kementerian Keuangan terkait laporan perubahan ekuitas pada tabel 11 ialah sebagai berikut :

Tabel 11
Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Sumber: Modul Kementerian Keuangan Tahun 2014

Berdasarkan tabel 11 dan penelitian yang dilakukan, di dapatkan pula laporan perubahan ekuitas yang disajikan oleh BPKD Prov. Sulsel seperti pada lampiran dan mengungkapkan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp 7.350.667.669.532,16.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

Terkait tantangan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsis Sulawesi Selatan di dapatkan informasi sebagai hasil penelitian ialah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemimpin

Terwujudnya nilai-nilai pembaharuan organisasi diperlukan sebuah komitmen dari para pemimpin, sehingga para pemimpin senantiasa memiliki tingkat kepekaan terhadap perubahan. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu secara efektif dan efisien, tetapi juga harus melaksanakan tugas organisasi dengan benar dan tepat, sesuai dengan gelombang maupun tantangan masa depan yang menghadang dan mempengaruhi organisasi.

Dalam kaitan dengan kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa komitmen berarti bersama-sama membawa kepemimpinan kepada keberhasilan. Secara khusus, komimen dapat diartikan sebagai janji hati untuk membawa kepemimpinan secara bersama-sama kepada keberhasilan yang didambakan. Berdasarkan pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa komitmen kepemimpinan ternyata begitu penting bagi keberhasilan kepemimpinan dalam setiap organisasi.

Terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, disampaikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bapak Agustinus Appang, SE pada tanggal 24 Agustus 2016 yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

> "Komitmen Pemprov Sulsel dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan, dan andal yaitu menerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang ada."

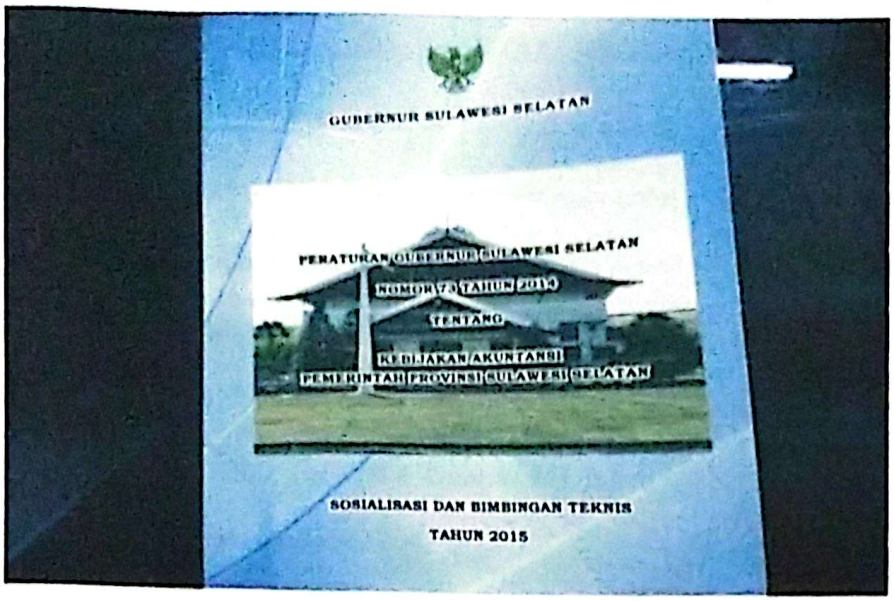
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Suryaningsih, SE, MM selaku Kepala Bidang Akuntansi melalui wawancara pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 yang mengatakan bahwa:

> "Setiap pemimpin harus memiliki komitmen dalam memimpin suatu organisasi. Apalagi yang tekait dengan kebijakan pelaporan keuangan. Dan hal ini harus pula didukung oleh komitmen staf untuk mencapai tujuan organisasi."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan disimpulkan bahwa pemerintah provinsi sulawesi selatan memiliki komitmen terhadap aturan yang berlaku yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memenuhi amanat perundang-undangan yang ada ialah dengan dikeluarkannya kebijakan terkait produk akuntansi yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: BPKD Prov. Sulsel

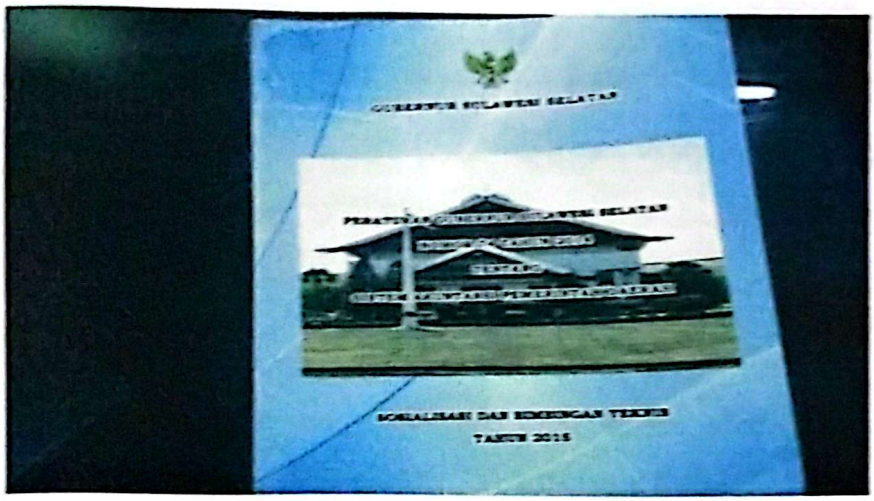
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 ini memuat prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Tujuan dari adanya kebijakan akuntansi ini ialah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sejak berlakunya pergub ini ialah berbasis akrual atas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dimaksudkan ialah laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disusun dengan basis kas.

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan laporan finansial ialah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas berbasis akrual, serta adanya catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan selaku SKPKD membuat 7 laporan keuangan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 sebagai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Selain Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014, dikeluarkan pula kebijakan yang terkait akan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Gambar 5
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



Sumber: BPKD Prov. Sulsel

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 ini memuat rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan

Dipindai dengan CamScanner

keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Pelaksanaan akan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan lingkup provinsi sulawesi selatan.

Bapak Agustinus Appang, SE melalui wawancara singkat yang dilakukan pada ruangan kepala BPKD pada tanggal 24 Agustus 2016 menyatakan bahwa:

> "Kebijakan berupa pergub yang dikeluarkan oleh pemprov diharapkan membantu pelaksanaan SAP di sulawesi selatan. Pergub ini tidak jauh berbeda dengan PP yang ada tetapi disesuaikan dengan konteks daerah itu sendiri."

Hal ini dikatakan oleh staf bidang Akuntansi BPKD pada tanggal 24 Agustus 2016:

> "Pergub yang dikeluarkan ini sangat membantu. Semua poin-poin yang kita butuhkan ada didalamnya dek. Jadi apapun kita mau tau tentang pelaporan keuangan ada di 2 kebijakan ini."

Setiap kebijakan yang dikeluarkan diharapkan memberikan dampak yang positif apalagi terkait dengan kinerja yang ada. Dalam setahun belakangan ini semenjak berlakunya pergub, laporan keuangan yang dibuat lingkup pemprov sulsel ialah menggunakan basis akrual. Secara aturan pelaksanaan basis akrual terhitung tahun anggaran 2015. Hanya saja, di lingkup Sulsel hal itu baru terlaksana pada triwulan ke-IV atau sejak bulan Oktober tahun 2015.

Selain komitmen secara normatif yaitu dengan adanya peraturan gubernur yang dikeluarkan terkait dengan basis akrual, komitmen pimpinan secara obyektif ialah dengan pelaksanaan atas peraturan gubernur tersebut dengan adanya ketujuh laporan keuangan yang telah dibuat oleh SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Sarana Pendukung

Segala sesuatu yang dapat menunjang dalam berbagai aktivitas organisasi yang berbentuk fisik serta dapat digunakan dalam keadaan normal organisasi dikategorikan sebagai sarana pendukung. Salah satu sara pendukung ialah teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, teknologi informasi dapat diartikan fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. TI ini membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia.

Salah satu ciri khusus dari bidang ilmu teknologi informasi adalah fokus perhatian bidang ilmu tersebut yang lebih bersifat aplikatif. Bidang ilmu teknologi informasi lebih mengarah pada pengelolaan data dan informasi dalam sebuah *enterprise* (perusahaan atau organisasi kerja lainnya), dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data serta lebih menekan-kan pada teknik pemanfaatan perangkat-perangkat yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. Begitu halnya juga dengan lingkungan institusi pemerintahan, TI digunakan untuk

Dipindai dengan CamScanner

keperluan sehari-hari, mulai dari urusan administrasi perkantoran sampai dengan pelayanan publik pemerintahan terhadap masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi di institusi pemerintahan antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pemerintahan. Komputer, database, sistem informasi kependudukan digunakan untuk membantu proses administrasi, surat menyurat dan pengarsipannya sudah dilakukan dengan menggunakan komputer dan printer.

Penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pemerintahan bisa berbeda-beda bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada di institusi itu sendiri. Bisa jadi sebuah institusi pemerintahan yang terdiri dari dinas-dinas, bagian dan seksi hanya menggunakan produk teknologi informasi saja tanpa perlu mengembangkannya. Penggunaan TI di institusi pemerintahan biasanya dalam bentuk *software* yang merupakan salah satu bentuk dari aplikasi TI. *Software-software* tersebut digunakan untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik sehari-hari. Banyak *software* yang digunakan di lingkungan institusi pemerintahan, mulai dari *software* untuk keperluan perkantoran (*office automation*, sistem informasi) seperti paket *Microsoft office* yang terdiri dari *Microsoft word, Microsoft excell, Microsoft acces dan Microsoft frotnpage*, selanjutnya untuk keperluan pendidikan (presentasi, dokumentasi, penilaian), sampai untuk kepentingan khusus (simulasi, prototype produk).

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma

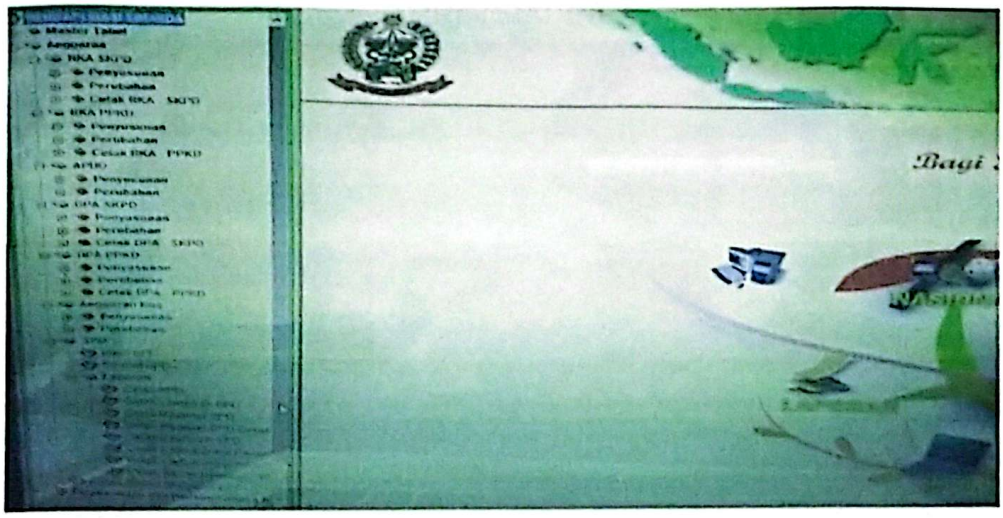
Dipindai dengan CamScanner

baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Berkaitan dengan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi sulawesi selatan, maka di buatlah suatu sistem yang dinamakan SIADINDA SKPD/SIstem Akuntansi DINas Daerah atau SIMAKDA INNOVA-PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Gambar 6
Aplikasi Sistem Akuntansi SKPD



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Agustus 2016

Dipindai dengan CamScanner

Aplikasi ini memuat rincian umum menu yang terkait dengan master tabel, anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, akuntansi dan pelaporan serta utilitas. Tujuan adanya sistem ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan ialah:

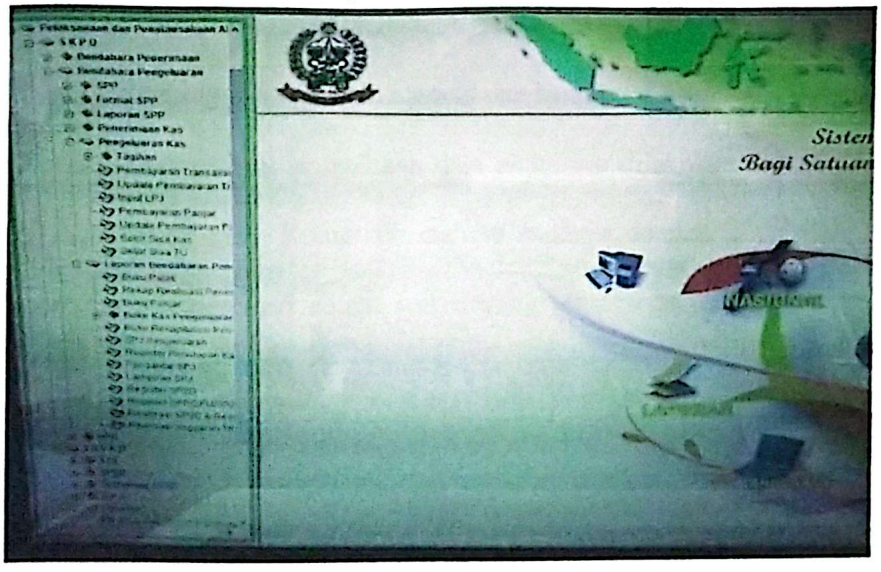
> "Teknologi informasi sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Ini simakda diadakan guna menyamakan bentuk pelaporan keuangan yang ada pada SKPD-SKPD lingkup sulsel."

Penggunaan sistem aplikasi ini dikemukakan oleh salah satu staf Bidang akuntansi melalui wawancara pada tanggal 29 agustus 2016:

> "Ini simakda hasil pengembangan dari yang lalu ji dek. Karena ada ini sistem jadi gampangji proses buat laporan keuangannya. Asal lincahjki juga pake komputer iya,hehe."

Dapat dilihat pula berdasarkan observasi peneliti, kelengkapan akan sistem aplikasi simakda melalui gambar dibawah ini:

Gambar 7
Rincian Menu Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD pada Aplikasi SIADINDA.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Agustus 2016

Dipindai dengan CamScanner

Suatu sistem dapat dikatakan berhasil ketika memiliki manfaat bagi penggunanya. Manfaat yang diperoleh terkait laporan keuangan yang dibuat ialah tercapainya prinsip-prinsip akuntansi dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Kasubag Bidang Akuntansi :

> "Pelaporan keuangan yang dilakukan sudah tepat waktu. Dan periode pelaporannya juga sudah sesuai. Dulu kan hanya ada 4 laporan. Sekarang itu harus 7 laporan yang dibuat."

Kepala Bidang Akuntansi yaitu Ibu Suryaningsih, SE,MM juga mengatakan:

> "Setiap sistem yang ada harus membantu perubahan yang berlaku. Walaupun kita sadari segala sesuatu itu memiliki dampak yang positif dan negatif."

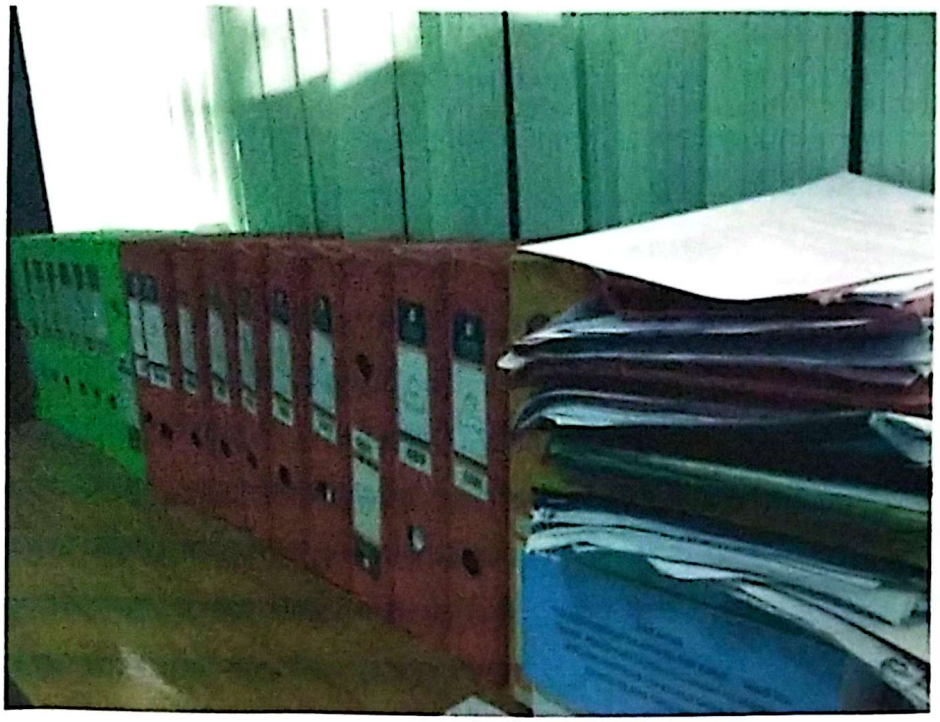
Untuk kelangsungan hidup organisasi tersebut, maka dibutuhkan penggunaan teknologi informasi yang lebih luas. Kualitas informasi merupakan tingkat dimana sebuah data yang telah diproses oleh sistem informasi menjadi memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat. Dengan adanya kemajuan teknologi saat sekarang perusahaan sudah mulai meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem komputer

Secara konseptional pengolahan data akuntansi dilakukan secara manual dan dengan komputer. Komputer mampu bekerja dengan konsisten, serta *reliable* (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat dibanding dengan kemampuan manusia. Dengan memakai teknologi informasi, walaupun dengan adanya penerapan sap berbasis akrual yang membutuhkan 7 laporan keuangan hal itu tetap dapat dilakukan dengan baik.

Dipindai dengan CamScanner

Selain secara softcopy, pelaksanaan basis akrual ini terkait ketujuh laporan keuangan ialah dengan adanya hard copy yang dicetak oleh SKPD dan di arsipkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan gambar 8 dibawah ini :

Gambar 8
Arsip Laporan Keuangan SKPD Pemprov Sulsel



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Agustus 2016

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu staf bidang akuntansi BPKD Sulsel pada tanggal 30 Agustus 2016, dikemukakan bahwa:

> "Setiap bulan SKPD datang menyetor ketujuh laporan keuangan yang mereka buat. Sesudah itu kami arsipkan dibundel-bundel yang telah disediakan."

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa segala sarana pendukung telah digunakan oleh SKPD-SKPD terkait penerapan standar berbasis akrual agar

Dipindai dengan CamScanner

mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun sejauh observasi peneliti bahwa sebaiknya disiapkan lemari yang lebih besar untuk menyusun berkas yang ada agar tidak berantakan dan dapat ditemukan jika ada pihak yang membutuhkan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi merupakan penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada tercapainya target produksi dan kepuasan *stakeholder*. Adanya Sumber Daya Manusia yang terpenuhi merupakan faktor utama dalam kegiatan pembangunan. Agar pembangunan bisa berjalan lancar dan maksimal, diperlukan tenaga kerja yang handal atau sumber daya manusianya baik.

Dipindai dengan CamScanner

Kompetensi sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kompetensi, organisasi dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu, yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan, maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. Adanya kompetensi juga memudahkan perusahaan dalam mendeskripsikan bagaimana kinerja seseorang dan melakukan pemetaan karyawan. Dari kompetensi yang tampak inilah perusahaan jadi lebih mengetahui bagaimana seorang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan perusahaan, mengendalikan diri saat menghadapi masalah/tekanan, dsb. Berdasarkan pengukuran pada kompetensi pula, dapat diketahui kompetensi-kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan pada masing-masing karyawan sehingga kinerjanya dapat meningkat. Intinya, kompetensi digunakan untuk merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku dan kinerja seseorang sehingga lebih terarah, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi institusi melalui kinerja strategis dan sinergis antar manusia di dalamnya. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan poduktivitas BPKD.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk menjawab kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Tetapi apabila dilihat dari sasarannya, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.

Sesuai dengan arahan izin penelitian yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa peneliti melakukan penelitian di Bidang Akuntansi. Sebaran pada masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 12
Sebaran PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikannya
di Bidang Akuntansi

Sebaran PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikannya di Bidang Akuntansi	
Jenjang Pendidikan	**Jumlah**
Pasca Sarjana (S2)	5
Profesi Akuntansi	2
Sarjana (S1)	13
Sarjana Muda (D3, D2, D1)	1
SMU/SLTA	8
JUMLAH	**29**

Sumber: Profil BPKD Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel 12 di atas, terlihat bahwa pegawai yang terbanyak di bidang akuntansi ialah pada jenjang pendidikan strata 1 yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian lulusan SMA sebanyak 8 orang dan pascasarjana sebanyak 5 orang. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan, dikarenakan apabila seorang pegawai tidak memiliki pengetahuan yang cukup, akan sulit untuk mengelola keuangan yang ada. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan pegawai sangat dibutuhkan apalagi menyangkut keterampilan dan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi terkait aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang baru mengenai keuangan.

Terkait kemampuan yang dimiliki staf bidang akuntansi, Selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Ibu Hj. Suada, SE,MM mengatakan:

> "Staf di Bidang Akuntansi itu bagus-bagus semua. Rata-rata giat bekerja. Mereka semua membantu SKPD-SKPD yang lain kalo ada kekeliruan dalam pelaporan keuangannya, supaya semua menjadi benar."

Hal yang senada pula dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Agustinus Appang, SE yang menyatakan:

> "Penempatan pegawai dan pejabat harus ditempatkan sesuai dengan ilmunya dan kemampuannya. Agar supaya pejabat struktural mampu mengontrol pekerjaannya staf."

Kemampuan seseorang dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan. Mengenai peningkatan kemampuan pegawai tentang penerapan SAP ini melalui sosialisasi-sosialisasi disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Ibu Hj. Suada, SE, MM pada tanggal melalui wawancara 23 Agustus 2016 didapatkan informasi:

Dipindai dengan CamScanner

> "Kalau sosialisasi banyak sekalimi nak. Semenjak ada itu PP 71 tahun 2010 ada terusmi sosialisasi, baik yang dibikin sama BPKD ataupun sosialisasi yang diikuti oleh BPKD."

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh salah satu staf bidang akuntansi melalui wawancara pada hari dan tanggal yang sama mengatakan bahwa:

> "Seingatku itu setiap tahun orang ikuti sosialisasi. Ini kan tentang pengelolaan keuangan sensitif ki' jadi harus diikuti terus perkembangan aturannya. Nah kita ini biar latar belakang akuntansi apalagi kalo bukan akuntansi jadinya harus teruski' belajar dek."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai pada bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap tahunnya diberikan pembekalan mengenai masalah pengelolaan keuangan. Dikarenakan para pegawai ini juga adalah aktor penting dalam penerapan SAP ini disebabkan BPKD selain merupakan SKPD juga merupakan SKPKD yang menaungi para SKPD-SKPD yang terdapat pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu sosialisasi terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilakukan pun dibuktikan dengan dokumentasi di bawah ini:

Gambar 9
Bimbingan Teknis Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



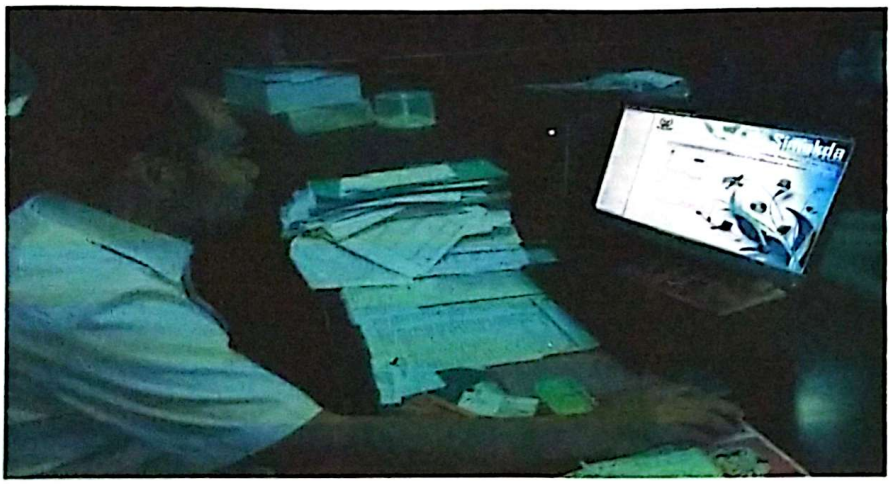
Sumber: BPKD Prov. Sulsel

Dipindai dengan CamScanner

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara bertahap dengan hasil akhir sebanyak VI angkatan. Dari kegiatan ini diharapkan para SKPD-SKPD yang ada mampu membuat laporan keuangan yang telah diatur dari penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada tingkat pemerintah daerah.

Pada umumnya terdapat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan tidak ingin mengikuti perubahan yang ada. Untuk itu dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan. Selain pengetahuan dan kemampuan, sumber daya manusia harus memiliki yang namanya perilaku/sikap. Sesuai dengan pengamatan yang dialami sendiri oleh peneliti bahwa perilaku pegawai BPKD sangat baik dikarenakan pelayanan yang diberikan sangat ramah dan sangat membantu dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada gambar 10 dibawah ini memperlihatkan aktivitas staf bidang akuntansi dalam pelaksanaan basis akrual.

Gambar 10
Penginputan Data Laporan Keuangan oleh Staf Bidang Akuntansi



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Agustus 2016

Dipindai dengan CamScanner

Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil ketika mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan ini bisa di dapat ketika oknum-oknum yang terkait saling bekerja sama dengan baik. Hal ini telah dibuktikan oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan telah bekerja tanpa lelah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat di BPKD, sehingga dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pelaporan Keuangan Daerah dari BPK RI untuk yang ke-6 kalinya secara berturut-turut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tantangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menyajikan 7 laporan keuangan pokok pada tahun 2015. Pelaksanaan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual itu di dukung :

1. Dari aspek komitmen pemimpin ialah sangat baik dikarenakan mendukung akan proses pengelolaan keuangan yang ada. Dukungan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dan adanya komitmen obyektif dari pemimpin ialah dengan pelaksanaan basis akrual sehingga mampu mewujudkan 7 laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dari aspek teknologi informasi memiliki sistem yang dinamakan SIMAKDA atau SIADINDA. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses pengelolaan laporan keuangan dikarenakan kelengkapan menu yang terdapat didalamnya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Dari aspek kompetensi sumber daya manusia khususnya pada bidang akuntansi memiliki kompeten yang memadai. Hal ini dilihat dari latar belakang jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai yang terdiri dari magister ekonomi, profesi akuntansi, sarjana ekonomi, ahli madya akuntansi, dan lulusan SMA. Sumber daya manusia yang ada ini setiap tahunnya diikutkan pelatihan ataupun sosialisasi terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sehingga SDM yang ada mampu membuat laporan keuangan tambahan yaitu laporan perubahan SAL, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas selain yang sudah ada yaitu laporan realisasi, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Salah satu kunci keberhasilan dari adanya suatu perubahan ialah dukungan yang kuat dari pimpinan. Komitmen pemimpin sangat diharapkan agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membantu pegawai dalam meningkatkan kinerja.
2. Teknologi informasi dapat dikatakan sudah baik, dikarenakan dari pelaksanaan sistem yang ada mampu menghasilkan laporan keuangan terkait penerapan standar akuntansi basis akrual yang dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sehingga tahun 2015 membuat Pemprov Sulsel memperoleh WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Namun,

Dipindai dengan CamScanner

harus terus dikembangkan apalagi terkait pengcoveran secara menyeluruh terkait laporan keuangan yang ada.

3. Kompetensi sumber daya manusia sudah cukup baik, namun bukan berarti tidak dapat ditingkatkan. Berikan program tugas belajar bagi pegawai-pegawai yang dianggap memiliki kapasitas untuk dapat lebih menunjang proses pengelolaan keuangan yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Afiah, Nunny Nur, (2009), *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Bastian, Indra (2006), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.

Djaenuri, Aries, (2012), *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Fitriasari, Dewi dan Deny Arnos, (2005), *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi Kedùabelas)*, Jakarta, Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri, (2007), *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus.* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Jogiyanto, 2003, *Sistem Teknologi dan Informasi*. Yogyakarta, Andi-Yogyakarta

Mahsun, Mohammad, Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha, (2007), *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.

Mamesah, D.J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, Pustaka Utama.

Matindas, R, 2002, Manajemen *Sumber Daya Manusia; lewat Konsep AKU (Ambisi, Kenyataan dan Usaha)*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Pasolong, Harbani, (2010), *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta

Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, (2007), *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustakaan Pelajar.

Ratmono, Dwi dan Sholihin Mahfud, (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Renyowijoyo, Muindro, (2008), *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*; Jakarta, Mitra Wacana Media.

Sartono, R.Agus, (2001), *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Edisi Empat)*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.

Dipindai dengan CamScanner

Siagian, Sondang P, (1996), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

----------, (2001), *Kerangka Dasar Pemikiran Administrasi*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soemarso, SR, (1999), *Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi Keempat)*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sugandi, Yogi Suprayogi, (2011), Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sugiri, Slamet, (1998), *Pengantar Akuntansi 1(Edisi Ketiga)*, Yogyakarta, UPP – AMP YKPN.

Syafiie, Inu Kencana, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi, (2005), *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo.

The Liang Gie, 1992, *Ilmu Administrasi: Pengertian, Kedudukan, dan Perincian*, Yogyakarta, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.

Waluyo, (2007), *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.

Yadiati, Winwin, 2007, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yani, Ahmad, 2009, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Yujana, Lalu Hendry, (1992), *Akuntansi Pemerintahan Mencakup Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia dan Mekanisme Pembukuan Bendaharawan – Sistem Baru (Edisi Kedua)*, Jakarta, Universitas Indonesia.

DOKUMEN PERATURAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan, (2013), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampiran dan Format Laporan (Edisi Terbaru)*, Bandung, Fokusindo Mandiri.

SUMBER LAIN

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, (2015), *Pedoman Penulisan Tesis*, Makassar, Lembaga Administrasi Negara.

2. Modul Kementerian Keuangan, (2014), *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat*, Jakarta, Kementerian Keuangan.

3. Jurnal Akuntansi Keuangan, *Menyusun Laporan Keuangan: 12 Hal Penting Untuk Diperhatikan.*

4. Jurnali, Teddy dan Supomo Bambang, (2002), *Pengaruh Faktor-Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesesuaian Tugas-Teknologi sebagai Pemordasi*. The 2nd National Converence UKSW MS.

5. BPKP, (2013), Modul *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, STAR-BPKP.

6. Mulyana, B, (2009), *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara lain*, [blogspot]

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel,
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel,
3. Kepala Subbidang Verifikasi & Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel,
4. Staf Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel

No.	PERTANYAAN PENELITIAN	PERTANYAAN WAWANCARA	INFORMAN
1.	Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek komitmen pemimpin ?	• Adakah kebijakan / peraturan yang dibuat oleh pimpinan dalam penerapan SAP? • Bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut?	1,2,3,4 1,2,3,4
2.	Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek teknologi informasi ?	• Apa tujuan dari sistem akuntansi ini? • Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menerapkan sistem ini? • Bagaimana keandalan sistem dalam pelaporan keuangan?	1 1,2,3,4 2,3

Dipindai dengan CamScanner

3.	Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek sumber daya manusia yang kompeten ?	• Bagaimana kemampuan SDM dalam pelaporan keuangan?	1,2,3,4

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Hal-hal yang perlu ditelaah dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,
5. Modul Kementerian Keuangan,
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,
8. Dokumen lain yang dianggap perlu.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

Hal-hal yang perlu diamati dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyajian laporan keuangan BPKD Prov. Sulsel,
2. Proses kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel,
3. Proses lain yang dianggap perlu, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Foto 1 mengenai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang teralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 269. Letaknya pada Gedung F lantai 1-4 lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan.



Foto 2 mengenai kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan



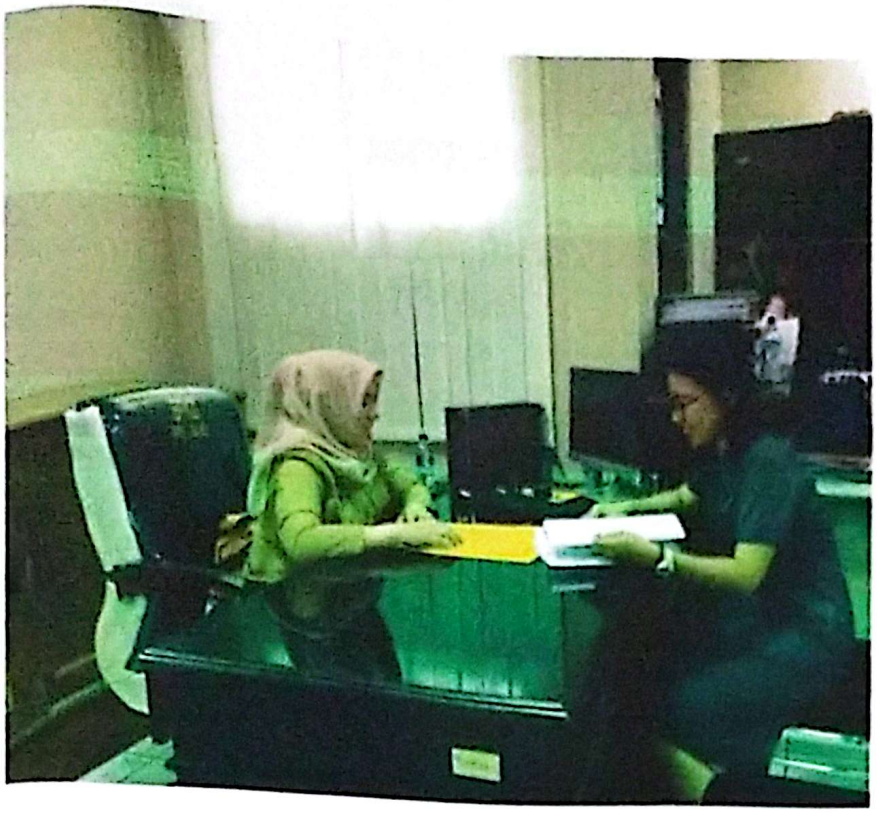
Dipindai dengan CamScanner

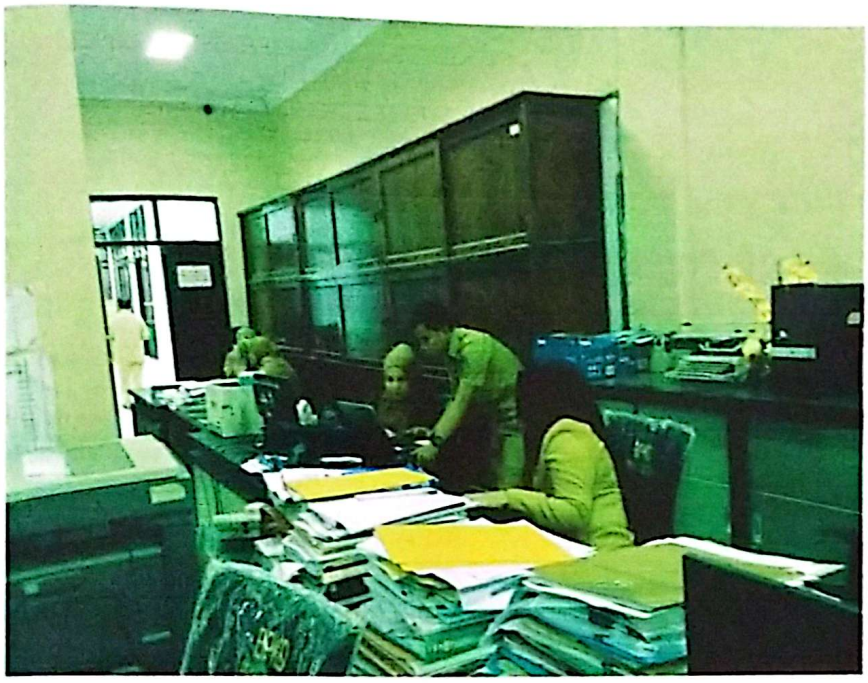


Foto 3 mengenai proses observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner

MODUL

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH PUSAT

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2014

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

4.1 Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket UU di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance)* yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Saat ini pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan dengan Basis Kas Menuju Akrual yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket UU bidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Dasar hukum penerapan akuntansi berbasis akrual adalah

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  Pasal 1:
  Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  Pasal 70 ayat (2):
  Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada

Dipindai dengan CamScanner

tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

4.2 Langkah-Langkah Penerapan Akuntansi Akrual di Indonesia

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Tahun 2010:
  i. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual,
  ii. Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual,
  iii. Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual.
- Tahun 2011 :
  i. Menyiapkan peraturan dan kebijakanuntuk penerapan akuntansi berbasis akrual,
  ii. Menyusun proses bisnisdan sistem akuntansiuntuk penerapan akuntansi berbasisakrual.
- Tahun 2012 :
  i. Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedomanyang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual,
  ii. Melaksanakan *capacity building* berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat,
  iii. Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.
- Tahun 2013 :
  i. Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan *capacity building,*
  ii. Penyusunan peraturan yang berkaitan.
- Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

i. Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan Keuangan, tetapi Laporan Keuangan **yang diberi opini oleh BPK** adalah yang berbasis CTA.
ii. Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,
iii. Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan.

- Tahun 2015

Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.

4.3 Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam rangka mendukung penerapan model manajemen keuangan baru berbasis akrual, diperlukan strategi dan persiapan yang terintegrasi dan efektif untuk mendukung keberhasilan proses migrasi menuju penerapan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual. Persiapan yang perlu dilakukan adalah sebagi berikut:

4.3.1 Training SDM

Training kepada *stakeholders* diperlukan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. Berdasarkan peta pemangku kepentingan, maka training kesiapan implementasi basis akrual dibagi ke dalam 3 (tiga) level, yaitu Level Penentu Komitmen dan Politis, Level Manajerial dan Level Teknis. Secara umum, melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan semua pemangku kepentingan memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.

4.3.2 Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi.

Pengembangan sistem akuntansi yang dibangun saat ini terdiri dari:

Dipindai dengan CamScanner

1. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sistem SPAN telah diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2013.
2. SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi). Pada tahun 2013 telah dilakukan tahapan *Integration Test*, sedangkan*piloting system*rencananya akan dilaksanakan tahun 2014 ini.

4.3.3 Dana

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan akrual, Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar dengan mempertimbangkan jumlah satuan kerja (lebih dari 24.000 satker) yang tersebar di seluruh Indonesia, kelompok pemangku kepentingan serta jenis komunikasi dan pelatihanyang dibutuhkan untuk berbagai level. Untuk itu, selain dana yang berasal dari APBN, Pemerintah juga mendapat komitmen untuk bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

4.4 Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia

4.4.1 Peluang yang Dimiliki

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut:

1. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara;
3. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual;
4. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP);
5. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual;
6. Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

7. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga;
8. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
9. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif;
10. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

4.4.2 Tantangan yang Dihadapi

Menurut Simanjuntak (2010) beberapatantangan penerapan akuntansiberbasisakrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi dan *Information Technology (IT) Based System*

   Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian internal yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Komitmen dari Pimpinan

   Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat baik bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat maupun Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Dipindai dengan CamScanner

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan SDM yang memiliki kompentensi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

4. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pada umumnya terdapat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan denganbaik tanpa ada resistensi.

5. Lingkungan/Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan di dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, antara lain:

1. Pengembangan sistem akuntansi berbasisakrual membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Kementerian Keuangan telah mengembangan SPAN (diluncurkan tanggal 19 Agustus 2013) serta

Dipindai dengan CamScanner

SAKTI di tingkat instansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual;

2. Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunanekuitas sebagai akibat penyusutan dan amortisasi;
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan (opini audit LKKL dan LKPP menurun);
4. Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di K/L, khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
5. Makin rumitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

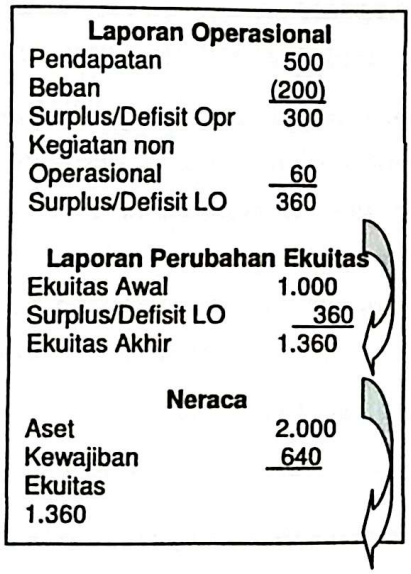
5.1 Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual pada Lampiran I PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

- Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL
- Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan (Gambar 4.1).



Gambar 4.1
Keterkaitan antara LO, LPE dan Neraca

Dipindai dengan CamScanner

5.2 Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pengertian dan Tujuan

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

5.2.2 Manfaat

- Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
  i. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  ii. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
  i. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
  ii. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
  iii. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

5.2.3 Struktur dan Isi

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

i. Pendapatan-LRA;

(a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

(d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(e) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(f) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

(g) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

(h) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

(i) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode

Dipindai dengan CamScanner

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

ii. Belanja;

(a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

(d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

(e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

(f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

iii. Transfer;

1. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

iv. Surplus/defisit-LRA;

2. Merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

v. Penerimaan pembiayaan;

(a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

vi. Pengeluaran pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

vii. Pembiayaan neto

Merupakan Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

viii. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5.2.4 Illustrasi Format

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	x	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengenaan Barang Mewah	xxx	xxx	x	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	x	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	x	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	x	xxx
8	Pendapatan Bea Meterai	xxx	xxx	x	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	x	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	x	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	x	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	x	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	x	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	x	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	x	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	x	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	x	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	x	xxx
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	x	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	x	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	x	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	x	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	x	xxx
31	bantuan sosial	xxx	xxx	x	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	x	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	x	xxx
34					
35	BELANJA MODAL	xxx	xxx	x	xxx
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	x	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	x	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	x	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	x	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	x	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	x	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (35 s/d 41)	xxx	xxx	x	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	x	xxx
44					
45	TRANSFER				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	x	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	x	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	x	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	x	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	x	xxx
52					
53	TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	x	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	x	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	x	xxx
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	xxx	xxx	x	xxx
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	xxx	xxx	x	xxx
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	xxx	xxx	x	xxx

5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3.1 Pengertian dan Tujuan

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5.3.2 Manfaat

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

5.3.3 Struktur dan Isi

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

i. ***Saldo Anggaran Lebih awal;***

ii. ***Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;***

iii. ***Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;***

iv. ***Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan***

v. ***Lain-lain;***

vi. ***Saldo Anggaran Lebih Akhir.***

5.3.4 Ilustrasi Format

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX
7	Lain-lain	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX

5.4 Neraca

5.4.1 Pengertian dan Tujuan

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

5.4.2 Manfaat

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan eukitas pemerintah pada tanggal tertentu.

5.4.3 Struktur dan Isi

- Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

  i. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos i) kas dan setara kas, ii) investasi jangka pendek, iii) piutang pajak dan bukan pajak, iv) persediaan, v)investasi jangka panjang, vi) aset tetap, vii) kewajiban jangka pendek, viii) kewajiban jangka panjang dan ix) ekuitas.

5.4.4 Ilustrasi Format

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	(Dalam Rupiah) 20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bank Indomaret		
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	(xxx)	(xxx)
13	Bagian Lancar Penjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Penjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Penjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20			
21	Jumlah Aset Lancar (1 s/d 19)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Non Permanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pemerintah	xxx	xxx
28	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)	xxx	xxx
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah		
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	xxx	xxx
45			
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53			
54	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	xxxx	xxxx
55			
56	KEWAJIBAN		
57			
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
59	Utang Pemerintah Pihak Ketiga (PPK)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	xxx	xxx
66			
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Pinjaman (Obligasi) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	xxx	xxx
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS		
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	xxx xxx	xxx xxx

5.5 Laporan Operasional

5.5.1 Pengertian dan Tujuan

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.5.2 Manfaat

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.5.3 Struktur dan Isi

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

- Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

(a) Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Beban

Beban diakui pada saat:

(a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadinya konsumsi aset;

(c)terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

- Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

- Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

- Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dipindai dengan CamScanner

5.5.4 Ilustrasi Format

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN PERPAJAKAN**				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	**PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	**PENDAPATAN HIBAH**				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	**BEBAN**				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
40					
41	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	**POS LUAR BIASA**				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx

5.6 Laporan Arus Kas

5.6.1 Pengertian dan Tujuan

- Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- Tujuan: untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Dipindai dengan CamScanner

- LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

5.6.2 Manfaat

Informasi dalam Laporan Arus Kas memiliki manfaat sebagai berikut:

- Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- Alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

5.6.3 Struktur dan Isi

Laporan Arus Kasmenyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan berikut:

- **Aktivitas Operasi**

i. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

ii. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

(a) Penerimaan Perpajakan;

(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

(c) Penerimaan Hibah;

(d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;

(e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan

Dipindai dengan CamScanner

(f) Penerimaan Transfer.

iii. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

(a) Pembayaran Pegawai;

(b) Pembayaran Barang;

(c) Pembayaran Bunga;

(d) Pembayaran Subsidi;

(e) Pembayaran Hibah;

(f) Pembayaran Bantuan Sosial;

(g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan

(h) Pembayaran Transfer.

- Aktivitas Investasi

i. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

ii. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

iii. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnya;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan dari Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

iv. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap;

(b) Perolehan Aset Lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

- Aktivitas Pendanaan

i. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

ii. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Penerimaan utang luar negeri;

(b) Penerimaan dari utang obligasi;

(c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;

(d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

3. iii. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pembayaran pokok utang luar negeri;

(b) Pembayaran pokok utang obligasi;

(c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;

(d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

- Aktivitas Transitoris

i. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

ii. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah

Dipindai dengan CamScanner

dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

5.6.4 Illustrasi Format

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kegiatan Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 56)	XXX	XXX
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX

Dipindai dengan CamScanner

5.7 Laporan Perubahan Ekuitas

5.7.1 Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.7.2 Manfaat

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.7.3 Struktur dan Isi

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

i. ***Ekuitas awal***

ii. ***Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;***

iii. ***Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:***

   (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

   (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

iv. ***Ekuitas akhir.***

5.7.4 Ilustrasi Format

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan

5.8.1 Pengertian dan Tujuan

- Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- Tujuan: Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

5.8.2 Manfaat

Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

5.8.3 Struktur dan Isi

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

i. ***Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;***

ii. ***Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;***

iii. ***Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;***

iv. ***Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;***

v. ***Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;***

vi. ***Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan***

vii. ***Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.***

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	6.445.779.161.296,00	6.105.815.095.557,51	94,72	5.503.161.406.065,78
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.432.698.249.296,00	3.270.828.511.466,51	95,28	3.029.122.238.495,78
3	Pendapatan Pajak Daerah	3.067.502.651.500,00	2.902.245.605.671,00	94,61	2.667.266.552.726,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	93.119.020.200,00	94.314.412.509,00	101,28	94.595.826.667,38
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.014.306.746,00	88.982.067.486,94	99,96	74.599.105.137,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	183.062.270.850,00	185.286.425.799,57	101,21	192.660.753.965,40
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.432.698.249.296,00	3.270.828.511.466,51	95,28	3.029.122.238.495,78
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.988.416.885.000,00	2.809.629.553.175,00	94,01	2.464.148.133.299,00
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	1.740.160.455.000,00	1.590.754.389.411,00	91,41	1.531.386.240.824,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak	256.711.515.000,00	170.370.403.409,00	66,36	218.129.274.254,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.080.783.000,00	17.687.427.002,00	70,52	30.681.745.570,00
13	Dana Alokasi Umum	1.180.010.167.000,00	1.180.010.167.000,00	100,00	1.209.598.741.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	278.357.990.000,00	222.686.392.000,00	80,00	72.976.480.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.740.160.455.000,00	1.590.754.389.411,00	91,41	1.531.386.240.824,00
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	1.248.256.430.000,00	1.218.875.163.764,00	97,64	932.761.892.475,00
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	1.248.256.430.000,00	1.218.875.163.764,00	97,64	932.761.892.475,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	1.248.256.430.000,00	1.218.875.163.764,00	97,64	932.761.892.475,00
21					
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
26					
27	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	24.664.027.000,00	25.357.030.916,00	102,80	9.891.034.271,00
28	Pendapatan Hibah	24.664.027.000,00	10.458.158.916,00	42,40	9.891.034.271,00
29	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	14.898.872.000,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	24.664.027.000,00	25.357.030.916,00	102,80	9.891.034.271,00
33					
34	**JUMLAH PENDAPATAN**	6.445.779.161.296,00	6.105.815.095.557,51	94,72	5.503.161.406.065,78
35					
36	**BELANJA**	4.872.092.732.876,43	4.514.809.893.426,89	92,66	3.973.542.749.343,29
37	**BELANJA OPERASI**	3.862.032.833.276,57	3.665.504.835.870,89	94,91	3.296.342.256.792,29
38	Belanja Pegawai	1.158.449.705.048,65	1.101.573.021.971,00	95,09	1.020.475.368.008,47
39	Belanja Barang	1.165.803.498.279,92	1.088.928.680.462,41	93,40	1.024.770.764.721,63
40	Belanja Bunga	29.100.000.000,00	28.158.982.447,48	96,76	16.151.416.303,19
41	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Hibah	1.508.679.629.948,00	1.446.844.150.990,00	95,90	1.234.944.707.759,00
43	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Belanja Operasi	3.862.032.833.276,57	3.665.504.835.870,89	94,91	3.296.342.256.792,29
45					
46	**BELANJA MODAL**	1.005.559.899.599,86	849.305.057.556,00	84,46	676.237.209.051,00
47	Belanja Tanah	112.031.728.000,00	88.406.830.140,00	78,91	1.064.851.345,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	166.067.196.451,00	146.656.696.257,00	88,31	98.659.948.943,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	157.470.658.186,86	146.288.377.545,00	92,89	71.647.256.158,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	561.772.905.019,00	460.757.325.674,00	82,01	502.931.362.165,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.190.873.750,00	1.146.191.209,00	96,24	1.218.618.400,00
52	Belanja Aset Lainnya	7.026.538.193,00	6.049.636.731,00	86,09	715.072.000,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6
53	Jumlah Belanja Modal	1.005.559.899.599,86	849.305.057.556,00	84,46	676.237.209.051,00
54					
55	**BELANJA TAK TERDUGA**	4.500.000.000,00	0,00	0,00	963.283.500,00
56	Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	0,00	0,00	963.283.500,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	0,00	0,00	963.283.500,00
58					
59	**TRANSFER**	1.747.420.735.484,39	1.634.794.648.686,29	93,55	1.626.844.026.494,43
60	**TRANSFER/BAGI HASIL KE KABUPATEN KOTA**	1.269.186.315.309,39	1.175.949.065.823,29	92,65	1.101.354.583.380,43
61	Bagi Hasil Pajak	1.269.186.315.309,39	1.175.949.065.823,29	92,65	1.101.354.583.380,43
62	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Kab. Kota	1.269.186.315.309,39	1.175.949.065.823,29	92,65	1.101.354.583.380,43
65					
66	**TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN**	478.234.420.175,00	458.845.582.863,00	95,94	525.489.443.114,00
67	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	476.420.102.087,00	457.599.416.832,00	96,04	525.489.443.114,00
68	Bantuan Keuangan Lainnya	1.814.318.088,00	1.246.166.031,00	68,68	0,00
69	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	478.234.420.175,00	458.845.582.863,00	95,94	525.489.443.114,00
70					
71	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	6.619.513.468.360,82	6.149.604.542.113,18	92,90	5.600.388.775.837,72
72					
73	**SURPLUS/DEFISIT**	(173.734.307.064,82)	(43.799.446.555,67)	25,20	(97.225.369.771,94)
74					
75	**PEMBIAYAAN**	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	309.734.307.064,82	309.744.920.343,82	100,00	339.681.251.209,76
77	Penggunaan SILPA	191.445.268.158,82	191.455.881.437,82	100,00	92.048.275.313,76
78	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	247.632.975.896,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	118.289.038.906,00	118.289.038.906,00	100,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	309.734.307.064,82	309.744.920.343,82	100,00	339.681.251.209,75
90					
91	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	100,00	51.000.000.000,00
92	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	51.000.000.000,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	100,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	100,00	51.000.000.000,00
104					
105	**PEMBIAYAAN NETTO**	173.734.307.064,82	173.744.920.343,82	100,00	288.681.251.209,75
106					
107	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	0,00	129.955.473.788,15	0,00	191.453.881.437,82

Makassar,...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	191.455.881.437,82	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	191.455.881.437,82	0,00
3	**Subtotal (1 - 2)**	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	11.666.434.882,15	0,00
5	**Subtotal (3 + 4)**	11.666.434.882,15	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	118.289.038.906,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	129.955.473.788,15	0,00

Makassar,...

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	122.955.838.527,81	153.236.479.485,52
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	725.752.302,00	2.753.825.855,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	8.400.000,00	6.642.123,00
7	Kas di BLUD	6.406.689.531,34	36.001.156.941,30
8	Investasi dalam Saham	0,00	0,00
9	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	52.749.872.103,30	578.975.644.548,30
11	Piutang Retribusi	8.071.200.727,00	2.433.029.873,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
13	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	604.633.531,00	604.633.531,00
14	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
15	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
16	Penyisihan Piutang	(24.173.646.793,33)	(262.102.260.321,66)
17	Belanja Dibayar Dimuka	1.126.672.927,65	0,00
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	75.857.515,00	77.814.715,00
23	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
24	Piutang Lainnya	20.911.701.910,00	117.974.375.070,00
25	Piutang Badan Layanan Umum Daerah	20.774.927.891,00	2.440.768.953,00
26	Persediaan	155.453.084.993,70	376.239.572.472,05
27	Jumlah Aset Lancar	365.690.985.166,47	1.008.641.683.245,51
28			
29	INVESTASI JANGKA PANJANG		
30	Investasi Nonpermanen		
31	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
32	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
33	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
34	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
35	Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
36	Investasi Permanen		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	785.034.636.213,28	688.717.849.905,98
38	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
39	Jumlah Investasi Permanen	785.034.636.213,28	688.717.849.905,98
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang	785.034.636.213,28	688.717.849.905,98
41			
42	ASET TETAP		
43	Tanah	4.138.447.249.828,22	3.989.107.201.489,89
44	Peralatan dan Mesin	975.285.188.350,00	857.804.882.825,00
45	Gedung dan Bangunan	937.928.637.594,46	862.101.416.205,46
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.870.494.396.357,57	5.653.025.721.675,57
47	Aset Tetap Lainnya	24.940.322.778,00	25.439.018.441,00
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	331.049.799.403,67	166.702.441.491,00
49	Akumulasi Penyusutan	(5.360.028.844.867,91)	(5.377.752.402.309,02)
50	Jumlah Aset Tetap	6.918.116.749.444,01	6.176.428.279.818,90

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
51			
52	DANA CADANGAN		
53	Dana Cadangan	0,00	0,00
54	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
55			
56	ASET LAINNYA		
57	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	5.250.000,00
58	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
59	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00
60	Aset Tak Berwujud	20.950.973.720,00	15.463.106.989,00
61	Aset Lain-lain	374.644.391,00	359.644.391,00
62	Jumlah Aset Lainnya	77.325.618.111,00	71.828.001.380,00
63			
64	**JUMLAH ASET**	**8.146.167.988.934,76**	**7.945.615.814.350,39**
65			
66	KEWAJIBAN		
67			
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	117.124.073,00	535.580.844,00
70	Utang Bunga	486.045.131,77	457.685.678,70
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	3.028.893.792,20	0,00
73	Utang Beban	436.717.835.357,63	420.950.752.121,12
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	24.082.500,00	14.373.524.312,92
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	576.373.980.854,60	572.317.542.956,74
76			
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
78	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
79	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
80	Utang Pemerintah Pusat	200.626.338.548,00	218.337.299.642,00
81	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
82	Utang Jangka Panjang Lainnya	18.500.000.000,00	0,00
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	219.126.338.548,00	218.337.299.642,00
84	JUMLAH KEWAJIBAN	795.500.319.402,60	790.654.842.598,74
85			
86	EKUITAS		
87	Ekuitas	7.350.667.669.532,16	7.154.960.971.751,65
88	JUMLAH EKUITAS	7.350.667.669.532,16	7.154.960.971.751,65
89			
90	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**8.146.167.988.934,76**	**7.945.615.814.350,39**

Makassar,...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	6.030.107.565.007,29	0,00	6.030.107.565.007,29	0,00
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.176.039.588.699,79	0,00	3.176.039.588.699,79	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	2.784.691.064.947,00	0,00	2.784.691.064.947,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	99.869.923.422,28	0,00	99.869.923.422,28	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.982.067.486,94	0,00	88.982.067.486,94	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	202.496.532.843,57	0,00	202.496.532.843,57	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.176.039.588.699,79	0,00	3.176.039.588.699,79	0,00
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.809.629.553.175,00	0,00	2.809.629.553.175,00	0,00
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	1.590.754.389.411,00	0,00	1.590.754.389.411,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak	170.370.403.409,00	0,00	170.370.403.409,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	17.687.427.002,00	0,00	17.687.427.002,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	1.180.010.167.000,00	0,00	1.180.010.167.000,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	222.686.392.000,00	0,00	222.686.392.000,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.590.754.389.411,00	0,00	1.590.754.389.411,00	0,00
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**	1.218.875.163.764,00	0,00	1.218.875.163.764,00	0,00
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	1.218.875.163.764,00	0,00	1.218.875.163.764,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	1.218.875.163.764,00	0,00	1.218.875.163.764,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer	2.809.629.553.175,00	0,00	2.809.629.553.175,00	0,00
22					
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	44.438.423.132,50	0,00	44.438.423.132,50	0,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
24	Pendapatan Hibah	29.539.551.132,50	0,00	29.539.551.132,50	0,00
25	Pendapatan Dana Darurat	14.898.872.000,00	0,00	14.898.872.000,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	44.438.423.132,50	0,00	44.438.423.132,50	0,00
28	**JUMLAH PENDAPATAN**	6.030.107.565.007,29	0,00	6.030.107.565.007,29	0,00
29					
30	**BEBAN**	6.067.714.898.691,41	0,00	6.067.714.898.691,41	0,00
31	**BEBAN OPERASI**	4.317.705.395.957,27	0,00	4.317.705.395.957,27	0,00
32	Beban Pegawai	1.105.670.537.316,90	0,00	1.105.670.537.316,90	0,00
33	Beban Persediaan	326.164.796.830,19	0,00	326.164.796.830,19	0,00
34	Beban Jasa	331.963.350.387,35	0,00	331.963.350.387,35	0,00
35	Beban Pemeliharaan	179.324.226.283,00	0,00	179.324.226.283,00	0,00
36	Beban Perjalanan Dinas	221.979.371.095,75	0,00	221.979.371.095,75	0,00
37	Beban Bunga	28.187.341.900,55	0,00	28.187.341.900,55	0,00
38	Beban Subsisdi	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Hibah	1.674.470.892.653,57	0,00	1.674.470.892.653,57	0,00
40	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Penyusutan	446.440.509.668,78	0,00	446.440.509.668,78	0,00
42	Beban Lain-lain	3.504.369.821,18	0,00	3.504.369.821,18	0,00
43	Jumlah Beban Operasi	4.317.705.395.957,27	0,00	4.317.705.395.957,27	0,00
44					
45	**BEBAN TRANSFER**	1.750.009.502.734,14	0,00	1.750.009.502.734,14	0,00
46	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	1.290.795.767.814,14	0,00	1.290.795.767.814,14	0,00
47	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	457.399.416.832,00	0,00	457.399.416.832,00	0,00
49	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Beban Transfer Keuangan Lainnya	1.814.318.088,00	0,00	1.814.318.088,00	0,00
51	Jumlah Beban Transfer	1.750.009.502.734,14	0,00	1.750.009.502.734,14	0,00
52	**JUMLAH BEBAN**	6.067.714.898.691,41	0,00	6.067.714.898.691,41	0,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
53					
54	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(27.XXX.XXX.XXX,XX)	0,00	(27.XXX.XXX.XXX,XX)	0,00
55					
56	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XXX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
57	SURPLUS NON OPERASIONAL	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
61	Jumlah Surplus Non Operasional	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
62					
63	DEFISIT NON OPERASIONAL	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
64	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX.XXX,XX	0,00	XXX.XXX,XX	0,00
65	Defisit Penghapusan Aset	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
66	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX,XX	0,00
68	Jumlah Defisit Non Operasional	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	X.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
69	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
70					
71	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00	XX.XXX.XXX.XXX,XX	0,00
72					
73	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
77					
78	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
82					
83	SURPLUS/ DEFISIT - LO	55.355.780.807,18	0,00	55.355.780.807,18	0,00

Makassar,...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :.....

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPOARAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dan Tahun 2014

URAIAN	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah	2.902.245.605.671,00	2.667.266.552.726,00
Retribusi Daerah	94.314.412.509,00	94.595.826.667,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.982.067.486,94	74.599.105.137,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.494.444.555,71	69.974.432.114,73
Dana Bagi Hasil Pajak	170.370.403.409,00	218.129.274.254,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	17.687.427.002,00	30.681.745.570,00
Dana Alokasi Umum	1.180.010.167.000,00	1.209.598.741.000,00
Dana Alokasi Khusus	222.686.392.000,00	72.976.480.000,00
Dana Penyusuaian	1.218.875.163.764,00	932.761.892.475,00
Hibah	10.458.158.916,00	9.891.034.271,00
Dana Darurat	14.898.872.000,00	
Pendapatan Lainnya		
Jumlah	**6.000.023.114.313,65**	**5.380.475.084.215,11**
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai	1.049.171.146.309,00	978.372.076.408,26
Belanja Barang dan Jasa	1.239.221.757.210,59	1.258.318.826.016,93
Belanja Bunga	28.158.982.447,48	16.151.416.303,19
Belanja Hibah	1.221.910.000.000,00	950.682.805.000,00
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan	458.845.582.863,00	525.489.443.114,00
Belanja Tidak Terduga		963.283.500,00
Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	1.175.949.065.823,29	1.101.354.583.380,43
Jumlah	**5.173.256.534.653,36**	**4.831.332.433.722,81**
ARUS KAS Bersih DARI AKTIVITAS OPERASI	**826.766.579.660,29**	**549.142.650.492,30**

Dipindai dengan CamScanner

URAIAN	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk :		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.282.437.348,00	997.478.300,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	22.004.235,00	20.009.400,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah	**1.304.441.583,00**	**1.017.487.700,00**
Arus Kas Keluar :		
Belanja Tanah	88.406.830.140,00	1.064.851.345,00
Belanja Peralatan dan Mesin	137.705.560.986,00	97.077.531.473,00
Belanja Gedung dan Bangunan	148.207.181.149,00	71.357.536.198,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	460.760.325.674,00	502.736.362.165,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.136.465.709,00	1.217.041.400,00
Belanja Aset Lainnya	6.049.636.731,00	715.072.000,00
Jumlah	**842.266.000.389,00**	**674.168.394.581,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	**(840.961.558.806,00)**	**(673.150.906.881,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk :		
Pencairan Dana Cadangan		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	118.289.038.906,00	247.632.975.896,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		
Penerimaan Kembali Investasi		
Penerimaan Sisa KAS bendahara Tahun Lalu	1.882.127.511,00	198.486.910,00
Jumlah	**120.171.166.417,00**	**247.831.462.806,00**
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		51.000.000.000,00
Piutang Lain-lain Pihak Ketiga		
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Yang Belum Di Setor	248.428.229,00	1.882.127.511,00
Sisa Kas Bendahara Penerimah Yang Belum Di Setor	8.400.000,00	
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	136.000.000.000,00	
Jumlah	**136.256.828.229,00**	**52.882.127.511,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	(16.085.661.812,00)	194.949.335.295,00

Dipindai dengan CamScanner

URAIAN	TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	50.016.684.471,00	44.198.914.506,00
Jumlah	**50.016.684.471,00**	**44.198.914.506,00**
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	50.016.684.471,00	44.198.914.506,00
Jumlah	**50.016.684.471,00**	**44.198.914.506,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(30.280.640.957,71)	70.941.078.906,00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	153.236.479.485,52	82.295.400.578,22
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	122.955.838.527,81	153.236.479.485,52
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	725.752.302,00	2.753.825.855,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	8.400.000,00	6.642.123,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	6.406.689.531,34	36.001.156.941,30
Saldo Akhir Kas	130.096.680.361,15	191.998.104.404,82

Makassar , ...

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	7.154.960.971.751,65	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	55.355.780.807,18	0,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	(8.501.800.752,00)	0,00
5	Koreksi Aset Tetap	5.[illegible]041.300,00	0,00
6	Koreksi Piutang	(508.723.[illegible]088,48)	0,00
7	Koreksi Penyisihan Piutang	240.39[illegible]582,51	0,00
8	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	434.557.[illegible]591,85	0,00
9	Koreksi Aset Lainnya	93.424.615,04	0,00
10	Koreksi Pinjaman Modal	0,00	0,00
11	Koreksi Investasi	0,00	0,00
12	Koreksi Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
13	Koreksi Hutang	(19.402.419.132,59)	0,00
14	Koreksi Pendapatan LO	(6.160.000,00)	0,00
15	Koreksi Investasi	0,00	0,00
16	Koreksi Hibah	(3.714.833.000,00)	0,00
17	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
18	Koreksi Asuransi	0,00	0,00
19	Koreksi pengembalian sisa kas	(482.123,00)	0,00
20	EKUITAS AKHIR	7.350.667.669.532,16	0,00

Makassar,....

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Dipindai dengan CamScanner

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR

A.P. Pettarani No. 61 Makassar 90222, Telp. (0411) 455949 Fax. (0411) 453438, E-mail: info@stialanmakassar.ac.id

Nomor : 1208/ KS.1/STA.04.4
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 28 April 2016

Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Sdr (i)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tesis untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, maka mahasiswa tersebut di bawah ini akan melakukan penelitian di dalam lingkup daerah pemerintahan Bapak / Ibu, yaitu :

Nama Mahasiswa	:	Steffiornis Andini Lopang
NPM	:	2014.06.010
Program Studi	:	Ilmu Administrasi
Konsentrasi	:	Administrasi Keuangan Negara (AKN)
Instansi	:	Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Judul Tesis	:	**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.**

Sehubungan dengan hal dimaksud, dimohon kesediaan Bapak/Ibu dapat memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian disampaikan, atas perkenaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua,
Pembantu Ketua I,

Dr. Muttalib, MBA
NIP. 19680320 199303 1 001

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	:	Stefliornis Andini Lopang, SE, Ak
Tempat Tanggal Lahir	:	Ujung Pandang, 10 September 1990
Alamat dan Nomor Telepon	:	Komp.YPPKG K10 No.54 / 085242686823
Nama Instansi	:	Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Sulsel
Alamat Instansi	:	Jl. Urip Sumoharjo No.269 Makassar
Riwayat Pendidikan	:	

1. Taman Kanak-Kanak Frater Bakti Luhur Makassar : 1995-1996
2. SD Frater Bakti Luhur Makassar : 1996-2002
3. SMP Frater Thamrin Makassar : 2002-2005
4. SMA Negeri 5 Makassar : 2005-2008
5. Universitas Hasanuddin - Ekonomi Akuntansi : 2008-2012
6. Universitas Hasanuddin - Pendidikan Profesi Akuntansi : 2013-2014
7. STIA-LAN Makassar – Magister Ilmu Administrasi : 2014-2016

Dipindai dengan CamScanner